

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, (f) penelitian terdahulu, serta (g) sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai pengeluaran yang konsumtif, namun memiliki fungsi produktif dan investatif bagi masa depan. Pendidikan telah dijadikan komoditas ekonomi dan sektor penting untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mengantarkan seseorang atau masyarakat kepada cita-cita dan merubah keadaannya menuju kondisi lebih baik.¹

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."² Hal itu menunjukkan bahwa adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia menjadi prioritas pendidikan di Indonesia. Pemerataan yang dimaksud semestinya tidak hanya menyangkut pemerataan akses pendidikan namun juga mencakup pemerataan kualitas pendidikan.

¹Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.”³ Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut digunakan pemerintah sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Semua biaya yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk sektor pendidikan merupakan investasi. Investasi dalam bidang pendidikan akan diperoleh dalam jangka waktu cukup lama namun bersifat jangka panjang dan memiliki efek berlipat ganda (*multiplier effects*).⁴ Keuntungan dan balikan investasi pendidikan juga terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu sendiri menghasilkan tenaga berkualitas, sedangkan kualitas tenaga kerja memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵

Pembiayaan merupakan salah satu *input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan diperlukan agar dapat melaksanakan semua kebijakan dan program sekolah untuk mencapai tujuan dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu studi mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan, termasuk pada jenjang pendidikan menengah yang berada di Kabupaten Tabalong.

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35

⁴Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi* (Bandung: Imtima, 2009), h.189

⁵Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, h.206

Kabupaten Tabalong secara geografis berada paling utara Kalimantan Selatan, terletak pada kawasan segitiga emas yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Tabalong terdiri dari dua belas kecamatan yang terbagi atas tiga wilayah pengembangan pembangunan, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Wilayah bagian tengah meliputi kecamatan Tanjung, Tanta, dan Murung Pudak. Potensi wilayah bagian tengah ini adalah pusat kota dan kantor pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan budaya serta pariwisata. Kecamatan Murung Pudak merupakan kecamatan dengan kepadatan dan jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 20,57 % dari jumlah penduduk Tabalong.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong menyatakan, “Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memperoleh keringanan dan/atau dibebaskan dari biaya pendidikan.”⁷ Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada sekolah-sekolah di Kabupaten Tabalong dalam rangka menunjang penuntasan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.⁸

Kebijakan pembebasan biaya pada satuan pendidikan merupakan hal yang menarik. Sehingga muncul pertanyaan, apakah sekolah sudah mampu membiayai

⁶Pemerintah Kabupaten Tabalong, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Tabalong,” dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014* (Tabalong: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, 2009), h. 28.

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong Pasal 13

⁸ Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong Pasal 1

program atau aktivitas sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan? Selain dukungan dana yang belum memadai, pengalokasian dana yang kurang tepat juga dapat menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan baru. Dalam memperhitungkan biaya pendidikan, apakah sekolah hanya berdasar pada berapa dana yang tersedia untuk menjalankan rangkaian kegiatan pembelajaran, atukah berdasar pada berapa besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan sekolah agar mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik?

Pada observasi awal, peneliti mengetahui bahwa MAN 1 Tanjung merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang berada di Kecamatan Murung Pudak. MAN 1 Tanjung merupakan madrasah di bawah binaan Kementerian Agama yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sekolah-sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional. SMAN 1 Tanjung merupakan salah satu sekolah di Kalimantan Selatan yang pernah ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sedangkan SMKN 1 Tanjung termasuk salah satu di antara 90 SMK terbaik se-Indonesia yang mendapatkan bantuan program *Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)* dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Asian Development Bank. Adapun SMA Hasbunallah Tabalong merupakan salah satu sekolah yang mendapat bantuan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Adaro Indonesia karena terletak di lintasan transportasi (*houling road*) pengangkutan batu bara.

Pemerintah telah menanggung sebagian besar biaya pendidikan, namun para siswa dan orang tua kerap kali masih harus menanggung unsur pembiayaan

pribadi.⁹ Hal itu sejalan dengan hasil studi yang menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka akan semakin besar pengeluaran dari biaya pribadi yang bersumber dari keluarga atau rumah tangga.¹⁰

Komponen penting yang harus dibiayai dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah biaya bagi terlaksananya pendidikan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh murid, keluarga, dan masyarakat yaitu berupa uang sekolah, pembelian bahan-bahan pelajaran, transportasi, maupun pengorbanan pendapatan selama belajar.¹¹ Pengorbanan pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang tidak diperoleh, kesempatan yang dikorbankan karena tidak bekerja, atau keuntungan yang hilang selama peserta didik menempuh pendidikan (*earning forgone*).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Sedangkan biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya

⁹Clive Gray, *et al.*, *Pengantar Evaluasi Proyek* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.239

¹⁰David Clark, *et al.* *Financing of Education in Indonesia* (Hong Kong: Asian Development Bank and Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong, 1998), h.33

¹¹Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.7

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.¹²

Pembiayaan dapat menjadi masalah yang cukup pelik bagi para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah pendanaan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.

Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Oleh sebab itu sekolah harus mampu mengalokasikan dan menggunakan dana secara efektif dan efisien.

Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar tidak menghambur-hamburkan harta, yakni melampaui batas yang ditetapkan syariat dalam membelanjakan yang halal, sebab orang yang melakukan pemborosan dimisalkan sebagai saudara syaitan, seperti terdapat dalam Q.S. Al Isrā'/17: 27.

Artinya: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (Q.S. Al Isrā': 27)

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Mulyasa menjelaskan bahwa penghematan biaya pendidikan menuntut kemampuan para pengelola dan tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan perencanaan, melaksanakan kebijakan anggaran, mengadakan pengawasan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan setiap biaya yang dikeluarkan secara transparan.¹³

Pembiayaan pendidikan bukan saja menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana secara efisien sehingga semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pendidikan.¹⁴ Dengan demikian pengelolaan pembiayaan memerlukan strategi yang baik agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta dikelola secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Studi Kasus pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

¹³Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.12

¹⁴Manuel Zymelman, *Financing and Efficiency in Education: Reference for Administration and Policy Making* (Boston: The Nimrod Press, 1973); dikutip oleh Mintarsih Danumiharja, *Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Uhamka Pers, 2004), h. 54.

2. Bagaimana penggunaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penganggaran pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui penggunaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan secara akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna melakukan penelitian lebih lanjut objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah maupun kepala madrasah dan pengelola pendidikan lainnya yang terlibat agar terlaksana pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi komite sekolah dan yayasan agar lebih memahami kinerja dan perannya dalam mendukung pengelolaan pembiayaan pendidikan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada istilah kunci yang menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan dalam rangka pemberdayaan semua sumber biaya pendidikan, meliputi aspek penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

2. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup penelitian ini membatasi biaya pendidikan hanya pada biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah pada tahun 2013 yang diperoleh melalui dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/RKAM). Biaya operasional meliputi biaya operasional personil maupun non personil.
3. Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. Ruang lingkup penelitian ini membatasi pada empat buah sekolah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Nanang Fattah (1998) melakukan studi berjudul Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar. Masalah pokok penelitian ini adalah sejauh mana faktor pembiayaan pendidikan menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan baik terhadap mutu proses maupun hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi berganda antara variabel-variabel biaya dengan mutu proses dan hasil belajar siswa SD di lima belas kecamatan Kabupaten Bandung diperoleh hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa komponen biaya yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap mutu proses belajar adalah gaji/kesejahteraan pegawai, pengelolaan sekolah, pengadaan alat pelajaran, dan pengadaan sarana sekolah. Sedangkan komponen biaya yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap mutu hasil belajar adalah gaji/kesejahteraan pegawai, biaya pendidikan guru, pengadaan alat pelajaran, pengadaan bahan pelajaran, dan pengadaan sarana sekolah.¹⁵

2. Penelitian Ni Luh Kadek Supartini (2012) berjudul Analisis Satuan Biaya Pendidikan SMAN 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran satuan biaya pendidikan dan besaran satuan biaya pendidikan per siswa (*unit cost*) di SMAN 1 Sukawati, serta korelasi antara standar biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran guru. Hasil penelitian menunjukkan satuan biaya pendidikan SMAN 1 Sukawati Rp5.157.347.900,00 dan satuan biaya pendidikan per siswa Rp6.683.151,74 pada tahun pelajaran 2010/2011. Penggunaan dana terbesar untuk biaya operasional personal, kemudian untuk biaya operasional non personal, biaya investasi, beasiswa dan bantuan. Terjadi peningkatan biaya pendidikan SMAN 1 Sukawati dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan, serta terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran.¹⁶

¹⁵ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.131

¹⁶Ni Luh Kadek Supartini, "Analisis Satuan Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2012)

3. Penelitian Eddy Khairani Z (2012) berjudul Strategi Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan di MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan di MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau sudah dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa unsur manajemen yang kurang sempurna seperti pembukuan keuangan. Ada beberapa faktor penyebab perbedaan pengelolaan keuangan antara kedua sekolah tersebut yakni SDM, pembiayaan, dan beban kerja.¹⁷
4. Penelitian Yulia Astuti (2013) berjudul Sistem Kepengawasan Pendidikan pada SMP Hasbunallah Binaan PT Adaro Pama Persada Nusantara Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kepengawasan pendidikan pada SMP Hasbunallah dan pola kerjasama pendidikan dengan PT Adaro Pama Persada Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepengawasan yang dilakukan berbeda-beda antara pengawas, kepala sekolah, dan pihak PT Adaro Pama Persada Nusantara. Pola kerjasama yang dikembangkan berupa pelatihan, diklat, program bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan, serta bantuan sarana dan prasarana.¹⁸

¹⁷Eddy Khairani Z, "Strategi Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan di MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau Kabupaten Tapin" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012)

¹⁸Yulia Astuti, "Sistem Kepengawasan Pendidikan pada SMP Hasbunallah Binaan PT Adaro Pama Persada Nusantara Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013)

Hal itu menunjukkan bahwa beberapa penelitian telah dilakukan mengenai manajemen atau pengelolaan pembiayaan di Indonesia, namun penelitian mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan, inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran. Pada bab ini dikemukakan teori dan konsep yang digunakan untuk pembahasan permasalahan yang dikaji.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian, meliputi gambaran lokasi penelitian dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan berkaitan dengan hasil penelitian.

Bab VI Penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini akan dibahas mengenai: (a) pengelolaan pembiayaan pendidikan, (b) biaya pendidikan, (c) sumber pembiayaan jenjang pendidikan menengah, (d) penganggaran pembiayaan pendidikan, (e) penggunaan pembiayaan pendidikan, (f) pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan, (g) efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, serta (h) kerangka pemikiran.

A. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola.¹⁹ Konsep manajemen memiliki arti dan makna yang sama dengan pengelolaan.²⁰ Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan pencapaian tujuan organisasi.²¹ Manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi yang diinginkan.²²

¹⁹ Reality Team, *Advanced Dictionary: English-Indonesian, Indonesian-English* (Surabaya: Reality Publisher, 2007), h.293

²⁰Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h.39

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.551

²²Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.18

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.²³ Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.²⁴ Manajemen dapat pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.²⁵

Dengan demikian manajemen atau pengelolaan merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien. Efektivitas yang diinginkan bukanlah efektivitas pribadi, melainkan efektivitas organisasi. Efektivitas tersebut dapat dilaksanakan dengan peran pimpinan dan pengelola.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait di dalamnya, yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan.²⁶

²³ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), h.6

²⁴Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h.4

²⁵Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 7

²⁶Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.1

Pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah, serta administrasi sekolah.²⁷

Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan inflasi. Sedangkan faktor internal mencakup tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan.²⁸

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan itu apabila diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan adalah menjadi tahap perencanaan (*budgeting*), tahap pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian (*auditing*).²⁹ Dengan kata lain, pengelolaan pembiayaan meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi.³⁰

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber daya pada kegiatan-kegiatan atau

²⁷Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, h. 6

²⁸ Hartati Sukirman, *et al.*, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h.31

²⁹Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 257

³⁰ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.171

program-program dalam pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar.³¹

Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan pengaturan biaya pendidikan yang meliputi aspek perencanaan, pengelolaan penggunaan, dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan semua sumber biaya pendidikan, baik yang telah disiapkan maupun yang harus digali sendiri dari masyarakat. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila prosedur dan mekanisme pengelolaan dapat dilakukan dengan baik, yaitu meliputi:

1. Proses perencanaan pembiayaan yang meliputi penetapan kegiatan, alokasi biaya, penentuan dan penetapan sumber dana;
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang meliputi penetapan prioritas pembiayaan, serta azas efektivitas dan efisiensi;
3. Kegiatan evaluasi penggunaan biaya pendidikan yang meliputi kesesuaian rencana dan pelaksanaan, tingkat keberhasilan dan kegagalan.³²

Menurut Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini prinsip dan fungsi pembiayaan pendidikan meliputi optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi.

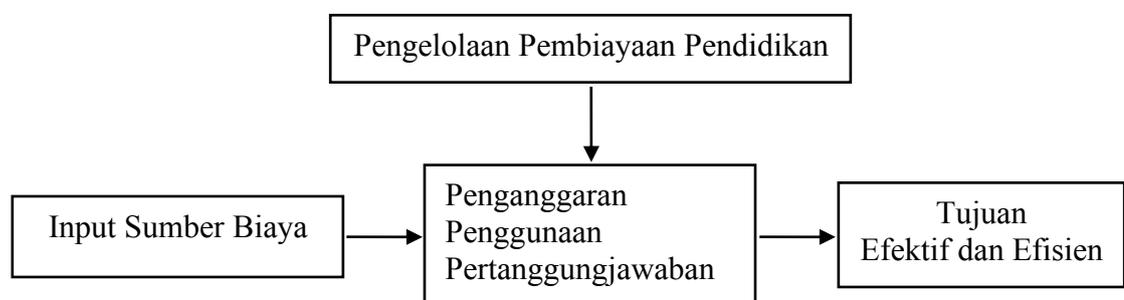
1. Optimalisasi sumber dana dalam fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh;

³¹Depdiknas, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud, 1993); dikutip oleh Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h.37

³² Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, h.53

2. Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses *financial decision* atau kebijakan dalam menentukan alokasi yang harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan;
3. Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.³³

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan dalam rangka pemberdayaan semua sumber biaya pendidikan yang meliputi penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

³³Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah; Teori, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.74

B. Biaya Pendidikan

Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah *cost*, *financial*, *expenditure*.³⁴ Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.³⁵

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.³⁶

Dengan demikian biaya memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Konsep biaya dalam bidang pendidikan memberikan pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan.

Secara umum, pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya rutin (*recurring cost*) dan biaya modal (*capital cost*). *Recurring cost* pada intinya mencakup keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sedangkan *capital cost* atau sering pula disebut biaya pembangunan.³⁷

³⁴ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, h.3

³⁵Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta: Indeks, 2010), h.104

³⁶ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.22

³⁷ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145

Biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Pembiayaan pendidikan ini meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, Pemprov, pemko/pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/yayasan;
3. Biaya pribadi peserta didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.³⁸

Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro dikenal beberapa kategori biaya pendidikan yaitu:

1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (*direct cost*) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, atau biaya yang menunjang peserta didik untuk dapat hadir di sekolah. Biaya tersebut meliputi biaya hidup, transportasi, *opportunity cost*, dan biaya lainnya;

³⁸Ary Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan* (Pustaka Educa: Bandung, 2010), h. 166

2. Biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi (*private cost*) adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan, berupa uang sekolah, uang pembelian buku, dan biaya hidup setiap peserta didik;
3. Biaya berbentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*). Biaya moneter dan biaya non moneter dapat berupa biaya langsung ataupun biaya tidak langsung, dibayarkan baik oleh masyarakat maupun individu. ³⁹

C. Sumber Pembiayaan Jenjang Pendidikan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.⁴⁰

Sumber pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu:

1. Sumber dari pemerintah. Sumber anggaran penyelenggaraan sekolah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (APBN dan APBD);

³⁹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Sumber dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat adalah biaya yang diperoleh dari masyarakat melalui iuran komite sekolah. Ikut sertanya masyarakat di dalam dunia pendidikan harus didasari adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga akan memotivasi masyarakat untuk memberikan bantuan terhadap pendidikan;
3. Sumber lain. Pembiayaan pendidikan bisa juga diperoleh melalui dana Bantuan Luar Negeri (BLN) yaitu semua bantuan yang berupa pinjaman atau pemberian (hibah) yang diterima oleh pemerintah sebagai bantuan yang dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Sumber anggaran lain dalam dunia pendidikan bisa juga diperoleh dari yayasan, swasta, kelompok masyarakat, alumni, maupun swadana dari masyarakat industri.⁴¹

Sumber pembiayaan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Sumber Pembiayaan Pendidikan

⁴¹ Mintarsih Danumiharja, *Manajemen Keuangan Sekolah*, h.54

Dalam rangka penuntasan program wajib belajar, salah satu program pemerintah yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sasaran program BOS adalah semua SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dengan besaran dana Rp560.000/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam dua periode, yaitu Rp60.000,00 untuk periode Januari-Juni 2013, dan Rp500.000,00 untuk periode Juli-Desember 2013.⁴²

Pemerintah Kabupaten Tabalong juga memiliki program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dalam rangka menunjang penuntasan program Wajib Belajar 12 tahun. Dana BOMM diberikan pada sekolah SMP, MTs, SMA, SMK, MA, atau Pondok Pesantren di Kabupaten Tabalong. Alokasi dana BOMM untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan penyaluran dana dilakukan setiap triwulan.⁴³

Program BOS secara konsep menjelaskan bahwa program bantuan pemerintah tersebut diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan. Disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting para pengelola pendidikan harus mampu melaksanakan tugas agar tujuan program BOS dapat tercapai.

⁴² Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2013), h.3

⁴³ Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong

D. Penganggaran Pembiayaan Pendidikan

Penganggaran atau *budgeting* merupakan proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga (estimasi kinerja) selama periode tertentu dalam ukuran finansial.

Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.⁴⁵ Dengan demikian, pada dasarnya penganggaran pembiayaan pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur penggunaan sumber dana yang ada di sekolah. Setiap keputusan dalam pembiayaan akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan.

Perencanaan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan;
2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik;
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan;
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi;

⁴⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 258

⁴⁵Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik, Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.49

5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;
6. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait;
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.⁴⁶

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran.⁴⁷ Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya, serta dari waktu ke waktu.

Dilihat dari perspektif pembiayaan pendidikan, pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Di antaranya adalah semakin besarnya peranan daerah di satu pihak dan semakin berkurangnya peranan pusat dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat terbatas pada penetapan kebijakan yang bersifat makro dalam bentuk pengalokasian anggaran untuk sekolah-sekolah dengan mengikuti standar rata-rata, sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat

⁴⁶Rohiat, *Manajemen Sekolah*, h.48

⁴⁷ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, h.54

mikro seperti alokasi dan distribusi anggaran pendidikan ke sekolah menjadi kewenangan daerah.⁴⁸

Di banyak negara, perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi menuntut perubahan pula dalam sistem alokasi pembiayaan pendidikan, antara lain dengan menerapkan formula pembiayaan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan riil sekolah (*needs-based funding formula*). Formula dimaksud diperlukan untuk menjawab pertanyaan seperti berapakah jumlah dana yang perlu dialokasikan untuk sekolah-sekolah dan faktor-faktor apakah yang harus diperhitungkan dalam menentukan alokasi dana untuk sekolah tertentu? Jawaban yang jelas terhadap kedua pertanyaan tersebut akan mampu mencegah, atau paling tidak mengurangi, terjadinya bias atau penyimpangan lainnya dalam menentukan alokasi dana karena alasan politik atau kepentingan lainnya.⁴⁹

Suatu lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama dengan bidang-bidang aktivitas lainnya. Biaya pendidikan merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan *output* yang berkualitas. Artinya sekolah/madrasah memerlukan biaya yang akan dipergunakan dalam berbagai keperluan, yaitu untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana, serta biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.

Pengelolaan pembiayaan terutama pengalokasian anggaran sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa

⁴⁸ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.15

⁴⁹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.16

sekolah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian anggaran sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Rohiat menjelaskan bahwa sekolah harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan (*income generating activities*) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.⁵⁰

Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai suatu bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis.⁵¹ Anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.

Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan fungsi ini organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat;
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*);
3. Anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu;

⁵⁰Rohiat, *Manajemen Sekolah*, h.66

⁵¹Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 359

4. Anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran, dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan;
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan adanya anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya;
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya;
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang namun masih mungkin dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.⁵²

Bedjo Sujanto menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan biaya pendidikan di sekolah. Proses pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan ini dimulai dari perencanaan

⁵² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 259

biaya yakni penetapan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah, dan perkiraan besaran biaya setiap kegiatan, selanjutnya memilih sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk digali dan ditetapkan sebagai sumber dana pendidikan. Kepala sekolah harus memikirkan dan merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di waktu mendatang, kemudian merencanakan langkah-langkah operasional yang mungkin dilakukan sesuai dengan sumber dana dan daya yang tersedia.⁵³

Oleh karena itu penyusunan rencana kegiatan sekolah harus realistis dan dapat dijangkau dengan biaya yang dimiliki oleh sekolah. Hal-hal seperti ini merupakan tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi sekolah untuk mewujudkan kreativitas dan kredibilitasnya.

Prosedur penyusunan anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran;
2. Mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang;
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial;
4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu;
5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak berwenang;
6. Melakukan revisi usulan anggaran;
7. Persetujuan revisi usulan anggaran;

⁵³Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, h.38

8. Pengesahan anggaran.⁵⁴

Dalam pelaksanaan kegiatannya, jumlah yang direalisasikan bisa kurang atau lebih dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi keuangan yang tidak sama dengan anggaran, harus dianalisis sebab-sebabnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi anggaran agar fungsi anggaran dapat tetap berjalan.

Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi karena hal berikut:

1. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran;
2. Terjadinya penghematan atau pemborosan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan;
4. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi;
5. Penyusunan anggaran yang kurang tepat.⁵⁵

Sekolah menyusun alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam penyusunannya harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing penyandang dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dari subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Dalam penyusunan anggaran dalam RKAS, setiap program atau kegiatan harus

⁵⁴Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 261

⁵⁵ Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, h.360

nampak jelas, terukur, dan rinci untuk memudahkan dalam menentukan besarnya dana yang diperlukan.⁵⁶

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun RKAS tersebut. Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Dalam menyusun RKAS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dengan pelibatan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Untuk anggaran rutin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama dengan staf sekolah diharapkan dapat menyusun prioritas penggunaan dana per mata anggaran secara cermat.⁵⁷

Langkah penyusunan RKAS dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Menginventaris program kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang;
2. Menyusun program kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas;
3. Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan;
4. Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkan ke dalam format baku RKAS;

⁵⁶Rohiat, *Manajemen Sekolah*, h.111

⁵⁷ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 133

5. Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.⁵⁸

Strategi anggaran merupakan titik awal dalam penyiapan dan pembuatan rencana organisasi. Penentuan strategi anggaran dimulai dengan menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal. Dengan pengelolaan dan strategi yang baik, organisasi dapat memperoleh manfaat dari peluang dan kekuatan yang ada, serta mengatasi kelemahan dan tantangan.

E. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan untuk kepentingan sekolah khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Penggunaan dan pengeluaran dana harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah.⁵⁹

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan pemerintah untuk sekolah disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional langsung ke sekolah. Pelaksanaan program tersebut mengikuti pedoman yang disusun oleh pemerintah. Dana bantuan yang bersumber dari pemerintah digunakan sekolah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, meliputi antara lain:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran;
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;

⁵⁸ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.269

⁵⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h.177

3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban dalam kegiatan ujian;
4. Pembelian peralatan pendidikan;
5. Pembelian bahan habis pakai;
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;
8. Langganan daya dan jasa lainnya;
9. Kegiatan penerimaan siswa baru;
10. Penyusunan dan pelaporan.⁶⁰

Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan integratif antara stakeholder. Untuk mewujudkan kondisi demikian perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kunci utama untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan sekolah ditujukan untuk membiayai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Setiap dana yang masuk ke sekolah digunakan untuk keperluan sekolah yang berbeda-beda oleh penanggungjawab setiap kegiatan melalui persetujuan kepala sekolah.

Kepala sekolah sebagai manajer juga memiliki fungsi otorisator. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang

⁶⁰ Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2013), h.6

mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan bendahara sekolah memiliki fungsi ordonator dan bendaharawan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.⁶¹

Kegiatan dalam penggunaan pembiayaan juga meliputi aktivitas pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, dan pengurusan yang menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.⁶²

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.⁶³

Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar. Di dalam sistem akuntansi terdiri dari catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal, dan buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan. Tujuan sistem akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi

⁶¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h.49

⁶²Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, h. 318

⁶³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 265

ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu.⁶⁴

Dengan demikian, pengelola sekolah yang disertai tanggung jawab melakukan tugas pembukuan atau akunting ini harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntansi, agar dapat menyajikan informasi yang tepat, yang akan digunakan oleh pimpinan maupun pihak lain untuk mengambil keputusan.

F. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pembiayaan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁶⁵

Evaluasi atau *evaluation involves auditing* merupakan pertanggungjawaban terhadap yang dicapai apakah telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. *Auditing* merupakan proses pembuktian dan menentukan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, selanjutnya apa yang dilaksanakan

⁶⁴Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 265

⁶⁵Hartani, *Manajemen Pendidikan*, h. 156

sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak berwenang.⁶⁶

Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan. Pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.⁶⁷ Proses evaluasi ini dilakukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Di sinilah peran seorang kepala sekolah untuk memantau dan menilai hasilnya.

Program kegiatan sekolah terkait dengan jumlah dana yang tersedia. Sinkronisasi program kegiatan dan pembiayaannya tertuang di dalam RKAS. Oleh karena itu dalam evaluasi pembiayaan, kepala sekolah harus melihat dan mencocokkan antara kegiatan dengan biaya yang digunakan, serta hasil dari kegiatan tersebut. Apabila capaian hasil seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, maka kegiatan dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila capaian lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan maka dikatakan tidak efektif.⁶⁸

Pengawasan merupakan suatu usaha yang bersifat terus menerus untuk mengetahui apakah aktivitas yang telah atau sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari kriteria-kriteria yang telah digariskan dalam rencana. Pengawasan tersebut dikatakan sebagai pengawasan yang bersifat preventif.

⁶⁶Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 267

⁶⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.66

⁶⁸ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, h.50

Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan (deviasi) maka diusahakan perbaikan (koreksi) supaya kesalahan tersebut jangan terulang kembali. Pengawasan ini dikatakan sebagai pengawasan yang bersifat represif.⁶⁹

Dengan demikian fungsi evaluasi dan pengawasan adalah untuk melihat apakah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan. Melalui pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Jika terjadi penyimpangan atau hambatan lainnya, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Hasil evaluasi dan pengawasan disampaikan pada pihak-pihak terkait agar penyesuaian yang diperlukan bisa segera dilakukan.

Pada tahap akhir pengelolaan pembiayaan, tugas bendaharawan dan pimpinan adalah membuat laporan keuangan sebagai bukti pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.⁷⁰ Hal itu menunjukkan bahwa laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penggunaan dana kepada pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan dari pihak pemberi dana.

G. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya

⁶⁹Tim Penyusun, *Analisis Biaya*, h. 145

⁷⁰ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, h.49

mempunyai kualitas yang baik, kegiatan tersebut disebut efisien dan efektif.⁷¹

Terdapat beberapa tipe analisis biaya yang relevan untuk diterapkan dalam bidang pendidikan, antara lain: *cost benefit analysis*, *study the determinants of educational costs*, *study economies of scale* dalam aplikasi teknologi pendidikan baru, dan studi analisis biaya pembangunan sekolah. Kegunaan *cost analysis* ini penting untuk dipelajari oleh perencana pendidikan karena semakin tingginya tekanan dari para pengambil kebijakan dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi.⁷²

Untuk menentukan biaya rutin yang dibutuhkan seorang peserta didik per tahun di sekolah digunakan analisis *unit cost*. Biaya satuan per siswa (*unit cost*) adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu.⁷³ Biaya satuan per siswa per jam pelajaran (*unit cost per hour*) juga dapat dihitung dengan membagi *unit cost* pertahun dengan jumlah jam pelajaran dalam setahun.⁷⁴ Analisis *cost effectiveness* (efektivitas biaya) merupakan salah satu pendekatan dengan perbandingan serangkaian alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu.

Analisis *cost effectiveness* (efektivitas biaya) dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah telah terlaksana secara efektif dan efisien. Analisis efektivitas biaya adalah sebuah

⁷¹Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.210

⁷² Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, h.8

⁷³ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.25

⁷⁴ J. Alan Thomas, *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration* (New York, London, Sydney, Toronto: John Wley and Sons Inc, 1971), h.47

analisis untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan biaya dan konsekuensinya dengan perhitungan biaya yang sistematis.

Dengan kata lain, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang dirancang untuk membantu dalam memilih antara program alternatif tindakan atau kebijakan ketika sumber daya terbatas. Sebagian besar keputusan pendidikan menghadapi kendala dalam ketersediaan sumber-sumber anggaran dan lainnya. Beberapa pendidikan lebih mahal daripada yang lain untuk hasil yang sama. Oleh karena itu pemilihan alternatif-alternatif yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu atau yang memiliki dampak terbesar per unit biaya adalah sangat penting. Dalam pendidikan, analisis efektivitas biaya digunakan dengan melihat hasil ujian sebagai ukuran keefektifan.⁷⁵

Mark Bray mencontohkan penerapan analisis ini pada institusi pendidikan dapat dilaksanakan ketika terdapat sejumlah pilihan yang dapat dipilih sekolah dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

TABEL 2.1 COST-EFFECTIVENESS OF ALTERNATIVE WAYS TO INCREASE STUDENT ACHIEVEMENT

Program	Cost per Student (A)	Effectiveness/Test Score (B)	Cost Effectiveness (A) : (B)
Split Classes	\$ 200	8 points	\$ 25 per points
Computers	\$ 100	20 points	\$ 5 per points
Teacher Training	\$ 60	6 points	\$ 10 per points
Textbooks	\$ 30	5 points	\$ 6 per points

Sumber: Mark Bray (2008)

Pada tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa strategi yang paling efektif dalam pembelajaran matematika adalah penggunaan komputer. Pada strategi ini

⁷⁵Mark Bray, *Double-Shift Schooling: Design and Operation for Cost-Effectiveness* (Paris: UNESCO, 2008), h.31

membutuhkan \$ 5 untuk meningkatkan 1 point nilai. Jika dibandingkan dengan strategi lain, komputer lebih efektif untuk digunakan. Itu berarti, biaya per siswa yang paling murah belum pasti paling efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan text book dalam contoh di atas merupakan strategi yang paling murah tetapi membutuhkan \$ 6 untuk meningkatkan 1 point nilai siswa. Sebaliknya, biaya per siswa yang paling mahal juga belum tentu paling efektif dalam meningkatkan nilai siswa.⁷⁶

Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa (*unit cost*) dan efektivitas biaya (*cost effectiveness*), berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Analisis biaya tersebut dapat membantu pengelola pendidikan untuk mengenali masalah pendidikan dan mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan pemanfaatan yang lebih jelas, pengelola pendidikan memiliki informasi tentang sumber pembiayaan yang tersedia dan bagaimana mengalokasikan sumber biaya tersebut, serta membantu pengelola pendidikan untuk menemukan dan menjelaskan pemborosan penggunaan biaya yang dialokasikan untuk pendidikan sehingga memiliki cara-cara pemecahan agar pemborosan tidak terulang lagi.⁷⁷

Kriteria keefektifan pembiayaan pendidikan juga dapat berdasarkan beberapa hal yaitu kepemimpinan yang berkemampuan dalam memperoleh sumber dana, mengalokasikan dan mendistribusikan, serta melakukan pengawasan; fokus penggunaan biaya diarahkan pada kegiatan dan kebutuhan

⁷⁶Mark Bray, *Double-Shift Schooling: Design and Operation for Cost-Effectiveness*, h.34

⁷⁷Tim Penyusun, *Analisis Biaya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h.21

institusi pendidikan; kerja sama yang baik dengan institusi terkait; konsisten dalam menerapkan aturan, baik penghargaan terhadap prestasi maupun hukuman terhadap pelanggaran; adanya dukungan komponen masyarakat yang cukup; penggunaan waktu efektif, serta terpelihara dan tercapainya hasil akademik.⁷⁸

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, meliputi proses penganggaran pembiayaan pendidikan, penggunaan pembiayaan pendidikan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Ruang lingkup fokus penelitian ini membatasi biaya pendidikan hanya pada biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah pada tahun 2013. Biaya operasional meliputi biaya operasional personil maupun non personil.

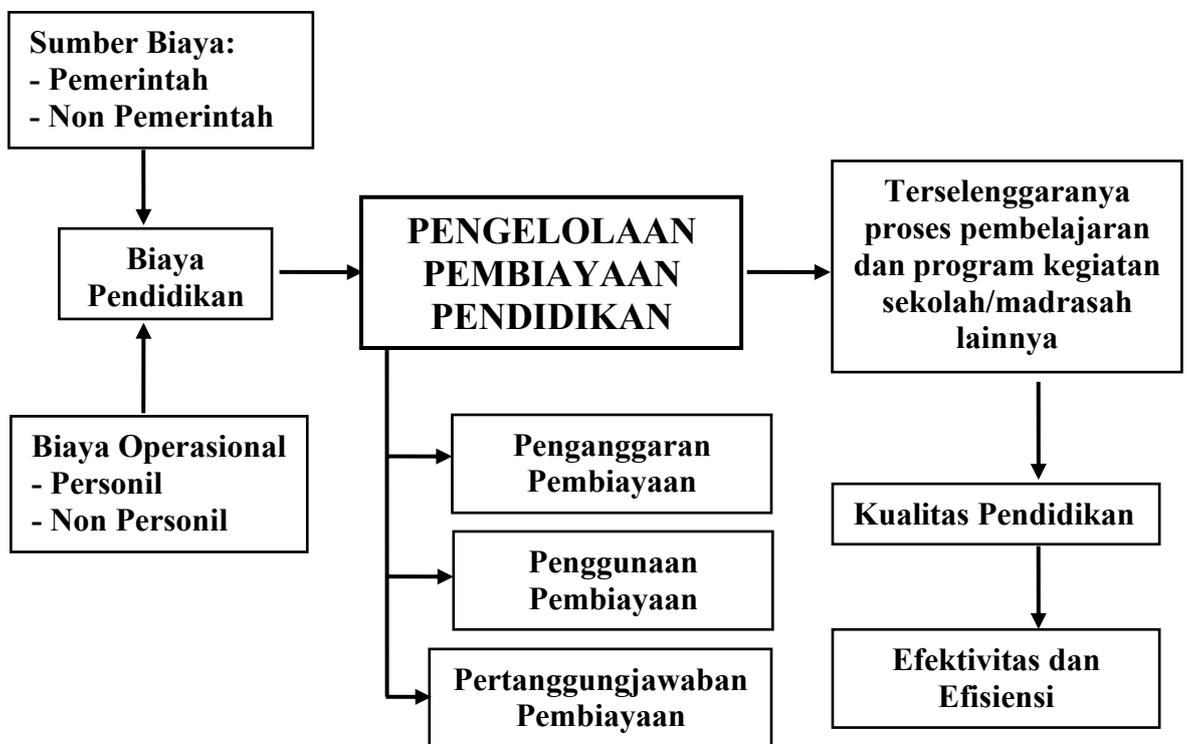
Pembiayaan merupakan salah satu *input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan diperlukan agar dapat melaksanakan semua kebijakan dan program sekolah untuk mencapai tujuan dan kualitas pendidikan. Selain itu pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah seperti tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan aspek lain yang terkait dengan masalah pendanaan.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari pengelolaan sekolah secara umum. Ketidakmampuan suatu sekolah menyediakan biaya, akan

⁷⁸Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.219

menghambat proses belajar mengajar dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan lainnya. Namun, bukan berarti apabila tersedia biaya yang berlebihan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Persoalan yang krusial adalah sejauhmana pembiayaan yang dikeluarkan tersebut dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan, serta dikelola secara efektif dan efisien.

Kerangka penelitian sebagaimana tergambar berikut:



Gambar 2.3 Skema Penelitian Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini yang akan dibahas mengenai: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) data dan sumber data, (d) prosedur pengumpulan data, (e) analisis data, serta (f) pengecekan keabsahan data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha memperoleh informasi selengkap mungkin mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷⁹

Karakteristik penelitian kualitatif yaitu meneliti kondisi objek yang alamiah atau bersifat naturalistik, deskriptif, analisis data bersifat induktif, menekankan pada proses dan data yang mengandung makna.⁸⁰ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan, penelitian ini menuntut peneliti untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan

⁷⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 94

⁸⁰ Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theories and Methods* (Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007), h. 4

kondisi yang ada sehingga diperoleh fakta dan keterangan yang faktual secara mendalam dan mengandung makna.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa sekolah jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak yang memiliki kecenderungan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen, studi kasus digunakan para peneliti kualitatif untuk melakukan riset pada beberapa tempat dan subjek yang berbeda sehingga memerlukan pengkajian lebih mendalam.⁸¹

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Penelitian kasus yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu sekolah, kesimpulan penelitian tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang diteliti.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada empat sekolah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, terdiri atas SMAN 1 Tanjung yang berada di Komplek Pertamina Kelurahan Belimbing Raya, MAN 1 Tanjung yang berada di Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Sulingan, SMKN 1 Tanjung yang berada di

⁸¹Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education*, h. 70

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.142

Komplek Stadion Kelurahan Pembataan, dan SMA Hasbunallah Tabalong yang berada di Kompleks Perum Swadharma Kelurahan Mabu'un.

Pemilihan keempat sekolah ini adalah untuk mewakili bentuk sekolah pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, yang masing-masing berlokasi pada kelurahan yang berlainan. Peneliti melihat banyak kemajuan yang diraih oleh sekolah ini dibanding sekolah lainnya, baik kemajuan akademis maupun non-akademis, serta berada pada lokasi yang strategis dan mudah diakses.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data yang diperoleh. Pengambilan sampel dan subjek penelitian harus dilakukan sedemikian rupa karena merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi.⁸³ Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang kontekstual. Jadi maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Oleh sebab itu pada

⁸³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.223

penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).⁸⁴

Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁸⁵ Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif, penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitas bukan jumlah, dipilih dari segi representasinya dengan tujuan penelitian.⁸⁶

Moleong menjelaskan bahwa peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif, namun yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Karena dalam banyak hal, kedua bentuk data tersebut diperlukan.⁸⁷

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti dari informan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, tenaga kependidikan, serta pihak yayasan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti RKAS/RKAM, nilai Ujian Nasional, serta data lainnya yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan.

⁸⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.224

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.140

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.188

⁸⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.38

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸⁸ Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi.

Peneliti dapat melakukan tugas pengamatan dengan leluasa jika menjadi bagian dari kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku, dan hasil kerja responden dalam situasi alami.⁸⁹ Melalui observasi, peneliti mempelajari perilaku dan makna perilaku tersebut.⁹⁰ Manfaat observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga memperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh;

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.81

⁸⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 78

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.83

- b. Peneliti memperoleh pengalaman langsung sehingga ia menggunakan pendekatan induktif, yang membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*;
- c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap biasa sehingga tidak akan terungkap dalam wawancara;
- d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang semula tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga;
- e. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang ada di luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif;
- f. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang banyak dan beragam tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.⁹¹

2. Wawancara.

Instrumen observasi mempunyai keterbatasan dalam menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi dari subjek yang diteliti, oleh sebab itu instrumen lain yang juga berfungsi untuk pengambilan data di lapangan adalah menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam, selama melakukan observasi peneliti juga

⁹¹Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.94

melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di dalamnya.⁹² Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti.⁹³ Wawancara dapat dilakukan secara individual ataupun secara kelompok.⁹⁴ Teknik wawancara ini banyak digunakan dalam penelitian karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh instrumen penelitian lainnya. Beberapa keunggulan wawancara yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian memperoleh rerata jawaban yang relatif tinggi dari responden;
- b. Peneliti dapat membantu menjelaskan, jika ternyata responden mengalami kesulitan menjawab yang diakibatkan ketidakjelasan pertanyaan;
- c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan dalam proses wawancara;
- d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kuesioner ataupun observasi. Informasi tersebut misalnya jawaban yang sifatnya pribadi dan bukan pendapat kelompok, atau informasi alternatif (*grapevine*) dari suatu kejadian penting.⁹⁵

3. Dokumentasi.

⁹² Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.85

⁹³ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, h. 79

⁹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 216

⁹⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, h. 80

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan hasil pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) maupun karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁹⁶ Peneliti sebaiknya memanfaatkan sumber dokumentasi secara intensif agar dapat memperoleh informasi secara maksimal yang dapat menggambarkan kondisi subjek atau objek yang diteliti dengan benar.⁹⁷ Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti terutama untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Manfaat penggunaan dokumen bagi penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong;
- b. Berguna sebagai bukti (*evident*) untuk suatu pengujian;
- c. Berguna dan sesuai karena sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks;
- d. Relatif murah dan tidak sukar diperoleh, hanya membutuhkan waktu untuk dicari dan ditemukan;
- e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁹⁸

E. Analisis Data

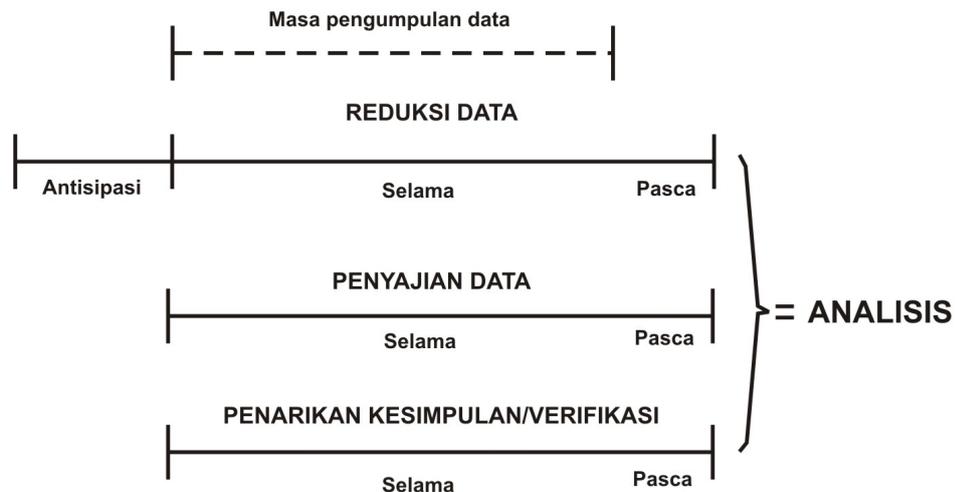
⁹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.161

⁹⁷ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, h. 81

⁹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.217

Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola-pola, pengungkapan hal-hal yang penting dan penentuan hal-hal yang dilaporkan.⁹⁹

Adapun aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.¹⁰⁰



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data

Langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

⁹⁹Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, h.176

¹⁰⁰Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2007), h.18

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Peneliti harus segera melakukan analisis data melalui reduksi data.¹⁰¹

Analisis dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan-kesimpulan yang singkat, padat dan bermakna. Dalam metode kualitatif, penafsiran dan analisis berjalan sejajar. Itu berarti bahwa pada waktu peneliti menganalisis data, pada saat yang sama dia sedang menafsirkannya juga. Beberapa langkah dalam membuat penafsiran yaitu sebagai berikut:

- a. Lihat dan baca kembali ringkasan hasil rekaman berkali-kali dan berusaha menangkap makna yang disampaikan;
- b. Konfrontasikan makna hasil ringkasan dengan konsep atau teori yang terdapat dalam buku-buku dan jurnal ilmiah yang berbicara tentang topik yang sama;
- c. Identifikasi perbedaan dan persamaannya. Identifikasi pula apa yang kurang dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan temukan kelebihan dari penelitian yang sedang dijalankan;
- d. Beri penilaian terhadap tempat, konteks, situasi, subjek yang terlibat dalam penelitian tersebut.¹⁰²

Tahap reduksi data ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, merangkum, dan memfokuskan pada

¹⁰¹ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, h.109

¹⁰² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h.128

hal-hal yang penting, sehingga dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas dan hal-hal pokok berkenaan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang dipahami tersebut. Dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan *chart*.¹⁰³

3. Verifikasi.

Pengujian dan verifikasi dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil penelitian sehingga melahirkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan diambil dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan-temuan dari hasil penelitian lainnya yang relevan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat teknik yaitu sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*credibility*).

¹⁰³Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, h.110

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang kredibel, yaitu dengan perpanjangan kehadiran peneliti, pengamatan terus menerus, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan atas kecukupan referensial, dan pengecekan anggota.¹⁰⁴ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁰⁵

2. Transferabilitas (*transferability*).

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer pada subjek lain yang memiliki tipologi yang sama.¹⁰⁶ Hasil penelitian sangat tergantung pada kesamaan konteks, apabila konteks pengirim relatif sama dengan konteks penerima maka barulah temuan itu dapat ditransfer, oleh sebab itu menuntut peneliti melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h. 176

¹⁰⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.332

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h. 177

dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.¹⁰⁷

3. Dependabilitas (*dependability*).

Kriteria ini digunakan untuk menilai proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah ia membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.¹⁰⁸

4. Konfirmabilitas (*confirmability*).

Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam *audit trail*.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.338

¹⁰⁸ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.177

¹⁰⁹ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, h.177

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam bab paparan data penelitian ini akan dipaparkan semua hasil temuan penelitian berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang terdiri dari: (a) penganggaran pembiayaan pendidikan, (b) penggunaan pembiayaan pendidikan, serta (c) pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. SMAN 1 Tanjung

SMAN 1 Tanjung yang beralamat di Kompleks Pertamina Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan sekolah negeri yang berdiri sejak tahun 1966, serta mempunyai nilai akreditasi sekolah amat baik (A). Waktu penyelenggaraan

sekolah sejak pukul 07.30-14.00 WITA. Kepala SMAN 1 Tanjung dijabat oleh Bapak Drs. Rusdi Yusran, M.Pd sejak tahun 2009 hingga sekarang.

SMAN 1 Tanjung mempunyai visi “Membentuk insan yang cerdas intelektual, spiritual dan emosional serta mampu bersaing di era globalisasi.” Misi SMAN 1 Tanjung yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas;
- b. Menyelenggarakan pembinaan keagamaan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan seni;
- d. Menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, menggembirakan dan mencerdaskan.

Rincian sarana prasarana di SMAN 1 Tanjung disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.1 RINCIAN SARANA PRASARANA SMAN 1 TANJUNG

No.	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Kelas	21
2	Ruang Kepala Sekolah	1
3	Ruang TU	1
4	Ruang Wakasek	1
5	Ruang Guru	1
6	Perpustakaan	1
7	Laboratorium IPA	1
8	Laboratorium Bahasa	1
9	Laboratorium Komputer	1
10	Ruang Kesenian	1
11	Koperasi	1
12	UKS	1
13	Ruang Ganti Pakaian Siswa	
14	Kamar Mandi/WC	

Sumber: Profil SMAN 1 Tanjung

Pada tahun 2013, SMAN 1 Tanjung mempunyai 665 orang siswa, dengan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) sebesar 38,44 dan rata-rata Nilai Sekolah (NS) sebesar 48,65 serta rata-rata Nilai Akhir (NA) sebesar 42,54. SMAN 1 Tanjung memiliki dua jenis kelas program layanan pendidikan yaitu kelas reguler dan kelas akselerasi, dengan tiga program jurusan, yaitu program jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

SMAN 1 Tanjung mempunyai 49 orang tenaga pendidik dan 12 orang tenaga kependidikan. Rincian kondisi tenaga pendidik di SMAN 1 Tanjung berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.2 KONDISI TENAGA PENDIDIK SMAN 1 TANJUNG

Ijazah Tertinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	
	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
S2	8	1
S1	31	9
Non Sarjana	-	-
Jumlah	39	10

Sumber: Profil SMAN 1 Tanjung

2. MAN 1 Tanjung

MAN 1 Tanjung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 10 No. 32 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan madrasah negeri yang berdiri sejak tahun 1968, mempunyai nilai akreditasi madrasah baik (B), dan merupakan satu-satunya Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Murung Pudak. Waktu penyelenggaraan sekolah sejak pukul 07.30-14.30 WITA. Kepala MAN 1

Tanjung dijabat oleh Bapak H. Alhamayu, S.Ag sejak tahun 2012 hingga sekarang.

MAN 1 Tanjung mempunyai visi “Beriman, berilmu, berprestasi, terampil, dan berakhlak mulia.” Misi MAN 1 Tanjung yaitu sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan sikap penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan kemuliaan dalam perilaku;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan inovatif dengan memanfaatkan semua komponen untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara optimal;
- c. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler PMR, KIR, Pramuka, Olimpiade MIPA dan olahraga secara terencana dan terarah bertumpu pada semangat untuk berprestasi;
- d. Melaksanakan pembinaan seni dengan menghususkan pada pembinaan dan pelestarian kesenian keagamaan;
- e. Melaksanakan pembinaan kedisiplinan di madrasah dengan pola asah, asih dan asuh.

Rincian sarana prasarana di MAN 1 Tanjung disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.3 RINCIAN SARANA PRASARANA MAN 1 TANJUNG

No.	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Kelas	9
2	Ruang Kepala Sekolah dan TU	1
3	Ruang Guru	1
4	Ruang BP	1
5	Perpustakaan	1
6	UKS	1
7	Kamar Mandi/WC	6
8	Musholla	1

Sumber: Profil MAN 1 Tanjung

Pada tahun 2013, MAN 1 Tanjung mempunyai 183 orang siswa, dengan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) sebesar 35,95 dan rata-rata Nilai Sekolah (NS) sebesar 52,77 serta rata-rata Nilai Akhir (NA) sebesar 42,72. MAN 1 Tanjung memiliki 4 program jurusan, yaitu program jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Agama.

MAN 1 Tanjung mempunyai 27 orang tenaga pendidik dan 7 orang tenaga kependidikan. Rincian kondisi tenaga pendidik di MAN 1 Tanjung berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.4 KONDISI TENAGA PENDIDIK MAN 1 TANJUNG

Ijazah Tertinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	
	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
S2	-	-
S1	18	8
Non Sarjana	-	1
Jumlah	18	9

Sumber: Profil MAN 1 Tanjung

3. SMK Negeri 1 Tanjung

SMKN 1 Tanjung yang beralamat di Kompleks Stadion Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan sekolah negeri yang berdiri sejak tahun 1984, serta mempunyai nilai akreditasi sekolah amat baik (A). Waktu penyelenggaraan sekolah sejak pukul 07.30-14.15 WITA. Kepala SMKN 1 Tanjung dijabat oleh Bapak Drs. Bambang Wahono, MM sejak tahun 2011 hingga sekarang.

SMKN 1 Tanjung mempunyai visi “Mewujudkan SMKN 1 Tanjung sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang mampu menghasilkan tamatan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan sesuai keahlian, dan dapat menerapkan kompetensi keahliannya di masyarakat dan di dunia kerja.”

Misi SMKN 1 Tanjung yaitu sebagai berikut:

- a. Membimbing siswa di bidang keagamaan;
- b. Menyiapkan siswa untuk menjadi wirausaha yang handal;
- c. Meningkatkan layanan pelatihan kompetensi siswa yang sesuai dengan potensi daerah dan tuntutan dunia kerja sesuai bidangnya;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- e. Meningkatkan penataan lingkungan ke arah sekolah berbudaya lingkungan.

Rincian sarana prasarana di SMKN 1 Tanjung disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.5 RINCIAN SARANA PRASARANA SMKN 1 TANJUNG

No.	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Kelas	42
2	Ruang Aula Serbaguna	1
3	Ruang Kepala Sekolah	1
4	Ruang Wakasek	5
5	Ruang SBI	1
6	Ruang Guru	1
7	Ruang Bendahara	2
8	Ruang TU	1
9	Ruang BP/BK	1
10	Ruang OSIS	1
11	Ruang UKS	1

12	Perpustakaan	1
13	Lab. Multimedia	1
14	Lab. Bahasa	1
15	Lab. Komputer	4
16	Ruang Diesel	1
17	Koperasi/Toko	3
18	Kamar Mandi/WC Guru	1
19	Kamar Mandi/WC Siswa	28
20	Musholla	1
21	Rumah Dinas Guru	5

Sumber: Profil SMKN 1 Tanjung

Pada tahun 2013, SMKN 1 Tanjung mempunyai 1.563 orang siswa, dengan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) sebesar 25,62 dan rata-rata Nilai Sekolah (NS) sebesar 32,20 serta rata-rata Nilai Akhir (NA) sebesar 28,27. SMKN 1 Tanjung memiliki 7 program keahlian yaitu Akuntansi, Sekretaris, Penjualan, Tata Busana, Tata Boga, Multimedia, serta Teknik Komputer dan Jaringan.

SMKN 1 Tanjung mempunyai 99 orang tenaga pendidik dan 22 orang tenaga kependidikan. Rincian kondisi tenaga pendidik di SMKN 1 Tanjung berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.6 KONDISI TENAGA PENDIDIK SMKN 1 TANJUNG

Ijazah Tertinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	
	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
S2	12	-
S1	45	35
Non Sarjana	1	6
Jumlah	58	41

Sumber: Profil SMKN 1 Tanjung

4. SMA Hasbunallah Tabalong

SMA Hasbunallah Tabalong adalah salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Hasbunallah Wani'mal Wakil, yang beralamat di Kompleks Perum Swadharma Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan sekolah swasta yang memadukan kurikulum pendidikan umum dengan kurikulum pendidikan Islam, berdiri sejak tahun 2009. Waktu penyelenggaraan sekolah sejak pukul 07.15-16.00 WITA. Kepala SMA Hasbunallah Tabalong dijabat oleh Bapak H. Rifki Azhari, Lc sejak Agustus 2013 hingga sekarang.

SMA Hasbunallah Tabalong mempunyai visi "Berprestasi dalam iptek dan maju dalam imtaq." Misi SMA Hasbunallah Tabalong yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran iptek dan imtaq di sekolah;
- b. Mendorong siswa untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dalam iptek;
- c. Membina dan mendorong kegiatan rohani, penelitian ilmiah, olah raga prestasi, kesenian yang islami, dan kedisiplinan mentaati tata tertib sekolah.

Rincian sarana prasarana di SMA Hasbunallah Tabalong disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.7 RINCIAN SARANA PRASARANA SMA HASBUNALLAH TABALONG

No.	Nama Bangunan	Jumlah
1	Teori/ Kelas	5
2	Ruang Kepala Sekolah dan Wakasek	1
3	Ruang Guru dan TU	1
4	Perpustakaan	1
5	Laboratorium IPA	
6	Kamar Mandi/WC	

Sumber: Profil SMA Hasbunallah Tabalong

Pada tahun 2013, SMA Hasbunallah Tabalong mempunyai 85 orang siswa, dengan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) sebesar 34,55 dan rata-rata Nilai Sekolah (NS) sebesar 51,03 serta rata-rata Nilai Akhir (NA) sebesar 41,16. SMA Hasbunallah Tabalong memiliki 2 program jurusan, yaitu program jurusan IPA dan IPS.

SMA Hasbunallah Tabalong mempunyai 17 orang tenaga pendidik dan 2 orang tenaga kependidikan, yang terdiri dari 1 orang guru tetap PNS, 14 orang guru tetap yayasan, dan 2 orang guru tidak tetap, serta 2 orang TU tetap yayasan. Rincian kondisi guru dan tata usaha di SMA Hasbunallah Tabalong berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.8 KONDISI TENAGA PENDIDIK SMA HASBUNALLAH TABALONG

Ijazah Tertinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	
	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
S2	-	-
S1	14	2
Non Sarjana	1	-
Jumlah	15	2

Sumber: Profil SMA Hasbunallah Tabalong

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan menguraikan data secara deskriptif mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan yang terdiri dari penganggaran pembiayaan pendidikan, penggunaan pembiayaan pendidikan,

serta pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Penganggaran Pembiayaan Pendidikan

a. SMAN 1 Tanjung

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin, juga dipraktekkan oleh SMAN 1 Tanjung. Kepala SMAN 1 Tanjung Bapak Drs. Rusdi Yusran, M.Pd sebagai penanggungjawab pengelolaan pembiayaan di sekolah menjelaskan proses penganggaran pembiayaan di SMAN 1 Tanjung sebagai berikut:

“Proses penyusunan anggaran dimulai sejak bulan Januari setiap tahunnya. Kepala sekolah membentuk tim penyusun untuk membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang terdiri dari lima wakasek dan dua bendahara.”¹¹⁰

Berkaitan dengan sumber pembiayaan, Kepala SMAN 1 Tanjung menjelaskan sebagai berikut:

“Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung gratis, mulai PSB sampai akhir anak belajar. Kalau tahun 2013 SMAN 1 Tanjung mendapatkan dana BOS dari pemerintah daerah Rp85.000,00/siswa/bulan. Sedangkan dana BOS dari pemerintah pusat Rp560.000,00/siswa/tahun, terbagi dalam dua tahap yaitu Rp60.000,00/siswa pada semester pertama, kemudian Rp500.000,00/siswa pada semester kedua.”¹¹¹

¹¹⁰ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

¹¹¹ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

SMAN 1 Tanjung merupakan salah satu sekolah di Kalimantan Selatan yang pernah ditunjuk menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Pada saat itu, sekolah mendapat bantuan dana yang cukup besar dari pemerintah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan sekolah. SMAN 1 Tanjung telah memasuki tahun kedua sebagai sekolah RSBI, hingga akhirnya RSBI dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung Bapak Tonie Marwan, M.Pd menjelaskan bahwa walaupun sudah tidak ada label RSBI, sekolah tetap terus meningkatkan mutu. Saat ini SMAN 1 Tanjung menargetkan untuk meraih sertifikat ISO 9001:2000, oleh sebab itu ada aturan dan prosedur yang harus dijalankan, serta manajemen sekolah yang terus diperbaiki.¹¹²

Dalam proses penganggaran pembiayaan, SMAN 1 Tanjung dibawah pimpinan kepala sekolah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak.

“Biasanya setiap awal tahun ada blanko form isian yang dibagikan ke wakasek dan para guru, termasuk juga pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium, dan TU. Kami diminta untuk menyampaikan rencana program kegiatan untuk satu tahun beserta kebutuhan dana yang diperlukan.”¹¹³

Hal itu senada sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Proses penyusunan anggaran (RKAS) dikoordinir wakasek manajemen mutu, koordinasi dengan wakasek lainnya serta Kepsek dan Komite. RKAS kurang lebih sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya ada sedikit perubahan dan penyesuaian. Ada lima wakasek dan masing-masing ada wakilnya, yakni wakasek manajemen mutu, kurikulum, kesiswaan,

¹¹²Tonie Marwan, Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 25 April 2014

¹¹³Mudjiono, Wakasek Kurikulum SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 28 Mei 2014

sarana-prasarana, dan humas. Kami mengumpulkan informasi dari berbagai pihak mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana, biasanya ada form isian yang dibagikan jadi mereka tinggal mengisi saja. Sesudah data tersebut diperoleh, tim penyusun mendiskusikan dan menyusun rancangan RKAS sesuai format yang sudah disediakan Dinas Pendidikan.”

¹¹⁴

Proses penganggaran pembiayaan di SMAN 1 Tanjung tidak hanya melibatkan tim penyusun RKAS, namun juga terdapat peran para guru dan Komite Sekolah, serta Dinas Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan Kepala SMAN 1 Tanjung berikut:

“Tim penyusun berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rancangan RKAS yang mereka buat. Selanjutnya rancangan tersebut dipresentasikan dalam rapat pertemuan dengan dewan guru untuk mendapatkan evaluasi dan saran tambahan, serta dikomunikasikan dan meminta persetujuan dari Komite Sekolah. Selanjutnya sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Kalau ternyata masih belum tepat, RKAS tersebut harus direvisi dulu.” ¹¹⁵

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran pembiayaan di SMAN 1 Tanjung dilaksanakan sejak awal Januari setiap tahun anggaran yang berlangsung, dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKAS yang terdiri dari wakasek dan bendahara. Tim penyusun RKAS menyediakan form isian yang berikan kepada para guru dan wakasek, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan.

¹¹⁴ Tonie Marwan, Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 25 April 2014

¹¹⁵ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dikaji dan pada akhirnya disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKAS. Tim penyusun membuat estimasi dana dan rancangan RKAS berdasarkan format yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Hasil rancangan RKAS tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Kemudian, sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Gambaran mengenai alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Alur Proses Penganggaran Pembiayaan di SMAN 1 Tanjung

Berkaitan dengan mekanisme pengalokasian anggaran pembiayaan, Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung menjelaskan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan memberikan aturan dan batasan dana BOS itu boleh digunakan untuk membiayai keperluan apa saja. Jadi kami harus mematuhi ketentuan itu dalam membuat alokasi, selain mengacu pada data program kegiatan dan kebutuhan dana sekolah yang telah kami kumpulkan dari para guru dan wakasek, sambil membandingkan dengan RKAS terdahulu yang

pernah dibuat. Kami juga harus menyesuaikan dengan anggaran penerimaan yang akan diterima sekolah. Kami menentukan prioritas dan mencoba *mencut* yang tidak perlu atau mirip dengan keperluan lain, karena dana bantuan dari pemerintah itu kan terbatas dan tidak semua usulan anggaran dapat disetujui.”¹¹⁶

SMAN 1 Tanjung melakukan evaluasi RKAS setiap tahun, agar RKAS terdahulu dapat dijadikan acuan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun selanjutnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan Kepala SMAN 1 Tanjung berikut:

“Dulu kami biasanya tidak membuat anggaran untuk lomba tingkat nasional, karena biasanya hanya bisa mengikuti perlombaan sampai tingkat provinsi saja. Tapi ternyata sekolah kami menang sampai tingkat nasional, sehingga sekolah jadi kebingungan mencari cara memperoleh dana untuk memberangkatkan siswa dan guru pendamping. Oleh sebab itu sekarang kami selalu anggarkan biaya perlombaan hingga tingkat nasional, supaya sudah ada persiapan. Akomodir pengalaman yang buruk, membuat kami lebih waspada karena ternyata ada yang harus dihadapi ke depan.”¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan tersebut, memberikan gambaran kepada peneliti bahwa dalam proses penganggaran pembiayaan pendidikan, anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian untuk menghindari adanya penggunaan dana yang terlalu besar atau tidak semestinya. Hal penting yang juga harus diperhatikan oleh pengelola pendidikan adalah proses penganggaran bukanlah praktek rutin yang selalu sama setiap tahunnya, akan tetapi harus berbasis pada penilaian kebutuhan sekolah dan tujuan jangka panjang, walaupun tetap dapat menggunakan anggaran terdahulu sebagai bahan pertimbangan.

¹¹⁶ Tonie Marwan, Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 25 April 2014

¹¹⁷Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

Pengelola pendidikan harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi sekolah dan memiliki perencanaan yang matang, serta senantiasa melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Adapun rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah di SMAN 1 Tanjung tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.9 RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH
SMAN 1 TANJUNG TAHUN 2013

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	BOS Pusat	372.400.000	1.	Belanja Pegawai	589.290.000
2.	BOMM Kab.Tabalong	678.300.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	278.845.500
			3.	Belanja Modal	182.564.500
	Jumlah	1.050.700.000		Jumlah	1.050.700.000

Sumber: RKAS SMAN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menjelaskan bahwa sumber penerimaan anggaran di SMAN 1 Tanjung berasal dari dana BOS pemerintah pusat sebesar Rp372.400.000,00 sedangkan dari dana BOMM Kabupaten Tabalong sebesar Rp678.300.000,00 yang berarti 35,44% biaya operasional sekolah berasal dari APBN sedangkan 64,56% biaya operasional sekolah berasal dari APBD Kabupaten Tabalong. Hal itu menunjukkan peran pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong.

SMAN 1 Tanjung juga menerima anggaran rutin belanja PNS pada tahun 2013 sebesar Rp1.914.628.800,00 sehingga jumlah total anggaran penerimaan SMAN 1 Tanjung adalah sebesar Rp2.965.328.800,00 pada tahun 2013.

b. MAN 1 Tanjung

Kepala MAN 1 Tanjung Bapak H. Alhamayu, S.Ag sebagai penanggungjawab pengelolaan pembiayaan di madrasah menjelaskan proses penganggaran pembiayaan di MAN 1 Tanjung sebagai berikut:

“Proses penyusunan anggaran dimulai sejak bulan Januari setiap tahunnya. kepala madrasah membentuk tim penyusun untuk membuat RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) yang terdiri dari kepala TU, tiga orang wakamad, dan dua orang bendahara (bendahara DIPA dan bendahara BOMM daerah).”¹¹⁸

Proses penganggaran pembiayaan dan penyusunan RKAM di MAN 1 Tanjung melalui informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Para guru, pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium, TU dan Wakamad diminta untuk menyampaikan rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang berlangsung. Karena kami ketemu setiap hari, jadi biasanya menyampaikan secara lisan saja mengenai kebutuhan dana dan program kegiatan. Biasanya kurang lebih sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, paling ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang.”¹¹⁹

Hal senada disampaikan Bendahara MAN 1 Tanjung sebagai berikut:

¹¹⁸ Alhamayu, Kepala MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Madrasah tanggal 10 Mei 2014

¹¹⁹ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

“Dana yang diterima sekolah dialokasikan pemerintah ke dalam dana DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), termasuk juga dana Bantuan Operasional Madrasah. Kementerian Agama memberikan aturan dan batasan anggaran. Jadi kami harus mematuhi ketentuan itu dalam membuat alokasi, selain mengacu pada data program kegiatan dan kebutuhan dana madrasah yang telah kami kumpulkan dari para guru wakasek, sambil membandingkan dengan RKAM terdahulu yang pernah dibuat.”¹²⁰

Tim penyusun berkoordinasi dengan kepala madrasah untuk membuat rancangan RKAM. Penyusunan RKAM menyesuaikan dengan aturan dan format RKAM yang telah ditetapkan Kementerian Agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Tim penyusun berkoordinasi dengan kepala madrasah mengenai rancangan RKAM yang telah dibuat. Selanjutnya rancangan tersebut dipresentasikan dalam rapat pertemuan dengan dewan guru untuk mendapatkan evaluasi dan saran tambahan, serta dikomunikasikan dan meminta persetujuan dari komite madrasah. Selanjutnya madrasah mengajukan RKAM tersebut ke Kanwil Kementerian Agama untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Kalau ternyata masih belum tepat, RKAM tersebut harus direvisi dulu.”¹²¹

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran pembiayaan di MAN 1 Tanjung dilaksanakan sejak awal Januari setiap tahun anggaran yang berlangsung, dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKAM yang terdiri dari kepala TU, wakamad dan bendahara. Tim penyusun RKAM mengakomodir masukan dari para guru dan wakamad, yang merupakan informasi mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan.

Tim penyusun membuat rancangan RKAM berdasarkan format yang telah disediakan Kementerian Agama. Hasil rancangan RKAM tersebut

¹²⁰ Milda Herawati, Bendahara I MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

¹²¹ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

dikoordinasikan dengan kepala madrasah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite madrasah untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Kemudian, sekolah mengajukan RKAM tersebut ke Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Gambaran mengenai alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan di MAN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Alur Proses Penganggaran Pembiayaan di MAN 1 Tanjung

Pada tahun 2013 MAN 1 Tanjung mendapatkan dana bantuan operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp75.000,00/siswa/bulan atau Rp900.000,00/siswa/tahun. Adapun bantuan operasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dialokasikan ke dalam dana DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran). Dana DIPA tersebut meliputi gaji PNS, dana BOS Pusat, maupun komponen operasional lainnya selain alokasi anggaran dana BOS. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah di MAN 1 Tanjung tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.10 RENCANA KEGIATAN ANGGARAN MADRASAH
MAN 1 TANJUNG TAHUN 2013

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	DIPA BOMM Daerah	1.144.155.400	1.	Belanja Pegawai	1.008.674.400
2.		186.300.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	302.781.000
			3.	Belanja Modal	19.000.000
	Jumlah	1.330.455.400		Jumlah	1.330.455.400

Sumber: RKAM MAN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa sumber penerimaan anggaran di MAN 1 Tanjung berasal dari dana DIPA sebesar Rp1.144.155.400,00 termasuk anggaran rutin belanja PNS sebesar Rp858.554.400,00. Sehingga sumber penerimaan anggaran biaya operasional di MAN 1 Tanjung dari dana DIPA hanya sebesar Rp285.601.000,00 sedangkan dari dana BOMM Kabupaten Tabalong sebesar Rp186.300.000,00 yang berarti 60,52% biaya operasional sekolah berasal dari APBN sedangkan 39,48% biaya operasional sekolah berasal dari APBD Kabupaten Tabalong.

c. SMKN 1 Tanjung

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin, juga dipraktekkan oleh SMKN 1 Tanjung. Kepala SMKN 1 Tanjung Bapak Drs. Bambang Wahono, MM sebagai penanggungjawab pengelolaan pembiayaan di sekolah menjelaskan proses penganggaran pembiayaan di SMKN 1 Tanjung sebagai berikut:

“Proses penyusunan anggaran dimulai sejak bulan Desember dan Januari setiap tahunnya. Kepala sekolah membentuk tim penyusun untuk membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang terdiri dari kepala TU,

lima orang wakasek (wakasek manajemen mutu, kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, dan humas), tujuh orang ketua program keahlian, dan dua orang bendahara (bendahara BOS Pusat dan bendahara BOS Daerah).”¹²²

Sejak tahun 2007 SMKN 1 Tanjung telah memenuhi standar sehingga mendapatkan sertifikat ISO. SMKN 1 Tanjung merupakan salah satu sekolah di Kalimantan selatan yang pernah ditunjuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sejak tahun 2007. Tahun 2008 SMKN 1 Tanjung termasuk salah satu sekolah dari 90 SMK terbaik se-Indonesia yang mendapatkan bantuan program *Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)* dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) sampai tahun 2013. Sejak saat itu sekolah mendapat bantuan dana yang cukup besar untuk membiayai seluruh program dan kegiatan sekolah, sebagaimana penuturan berikut:

“Direktorat Pendidikan SMK di tingkat pusat terus memperhatikan SMK yang setiap tahun perkembangan dan prestasinya luar biasa, serta pengelolaan sekolah yang memenuhi standar dan penilaian. Tim verifikasi Direktorat juga datang langsung ke sekolah. Selain itu, sekolah juga aktif mengajukan proposal dan berkonsultasi dengan pihak Direktorat, baik melalui telepon atau kalau lambat, kami yang berkunjung ke sana, jadi ada sekolah mengirim tim untuk datang langsung ke Jakarta. Kita maklum Direktorat juga harus mengurus banyak sekolah se-Indonesia. Oleh sebab itu, sekolah jangan hanya menunggu, tetapi harus pro-aktif.”¹²³

Kepala SMKN 1 Tanjung menjelaskan bahwa walaupun program *Invest* hanya berlaku sampai tahun 2013 saja, namun sekolah sudah menyiapkan rencana mengusulkan untuk menjadi sekolah rujukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

¹²² Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

¹²³ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

“Kalau sudah jadi sekolah rujukan, nanti perkembangannya sama saja seperti program *Invest* itu. Sekolah bisa mendapatkan dana yang memadai, ada penambahan dan perbaikan gedung, ruang belajarnya harus lantai 2 semua, dan sebagainya.”¹²⁴

Dalam proses penganggaran pembiayaan, SMKN 1 Tanjung melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi.

“Biasanya sekitar bulan Desember atau Januari, ada blanko form isian yang dibagikan kepada para guru, wakasek, ketua program keahlian, termasuk juga pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium, dan TU. Mereka diminta untuk menyampaikan rencana program kegiatan untuk satu tahun beserta kebutuhan dana yang diperlukan.”¹²⁵

Tim penyusun RKAS membuat alokasi anggaran untuk keperluan setiap kegiatan, sebagaimana yang dinyatakan bendahara I SMKN 1 Tanjung Ibu Rusmiliani, S.Pd, MM dalam penuturan berikut:

“Alokasi bukan hanya tugas bendahara, tetapi dirapatkan bersama tim, karena sulit jika hanya sendiri. Dinas Pendidikan memberikan batasan dana BOS itu boleh digunakan untuk membiayai keperluan apa saja. Pemerintah sudah menetapkan aturan pengalokasian, tinggal kita ikuti. Misalnya alat tulis sekolah untuk keperluan pembelajaran menggunakan dana BOS Pusat, sedangkan ATK untuk keperluan kantor menggunakan dana BOS daerah. Kami menentukan prioritas pengalokasian anggaran berdasarkan informasi rencana kegiatan dan kebutuhan sekolah.”¹²⁶

Proses penganggaran pembiayaan tidak hanya melibatkan tim penyusun RKAS, namun juga terdapat peran para guru dan komite sekolah, serta Dinas Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

¹²⁴ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

¹²⁵ Arie Wibowo, Bendahara II SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

¹²⁶ Rusmiliani, Bendahara I SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

“Tim penyusun berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rancangan RKAS yang dibuat. Selanjutnya rancangan tersebut dipresentasikan dalam rapat pertemuan dengan dewan guru untuk mendapat evaluasi dan saran tambahan, serta dikomunikasikan dan meminta persetujuan dari komite sekolah. Selanjutnya sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Kalau ternyata masih belum tepat, RKAS tersebut harus direvisi dulu.”¹²⁷

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran pembiayaan di SMKN 1 Tanjung dilaksanakan sekitar bulan Desember atau Januari.

Proses penganggaran pembiayaan di SMKN 1 Tanjung dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKAS yang terdiri dari kepala TU, wakasek, ketua program keahlian, dan bendahara. Tim penyusun RKAS menyediakan form isian yang berikan kepada para guru, wakasek, dan ketua program keahlian, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan.

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dikaji dan pada akhirnya disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKAS. Tim penyusun membuat estimasi dana dan rancangan RKAS berdasarkan format yang telah disediakan Dinas Pendidikan.

Hasil rancangan RKAS tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Kemudian, sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

¹²⁷ Arie Wibowo, Bendahara II SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

Gambaran mengenai alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Alur Proses Penganggaran Pembiayaan di SMKN 1 Tanjung

Pada tahun 2013 sumber pembiayaan SMKN 1 Tanjung berasal dari dana bantuan operasional pemerintah daerah sebesar Rp90.000,00/siswa/bulan atau Rp1.080.000,00/siswa/tahun, sedangkan dana bantuan operasional pemerintah pusat sebesar Rp560.000,00/siswa/tahun, serta bantuan dana program *Invest*.

Adapun rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah di SMKN 1 Tanjung tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.11 RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMKN 1 TANJUNG TAHUN 2013

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	Pemerintah Pusat BOMM Kab.Tabalong	1.510.054.832	1.	Belanja Pegawai	942.754.500 1.692.595.500 617.824.832
2.		1.743.120.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	
			3.	Belanja Modal	
	Jumlah	3.253.174.832		Jumlah	3.253.174.832

Sumber: RKAS SMKN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menjelaskan bahwa sumber penerimaan anggaran di SMKN 1 Tanjung berasal dari pemerintah pusat berupa program *Invest* dan BOS sebesar Rp1.510.054.832,00 sedangkan dari dana BOMM Kabupaten Tabalong sebesar Rp1.743.120.000,00 yang berarti 46,42% biaya operasional sekolah berasal dari APBN sedangkan 53,58% biaya operasional sekolah berasal dari APBD Kabupaten Tabalong. Hal itu menunjukkan peran pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong.

SMKN 1 Tanjung juga menerima anggaran rutin belanja PNS pada tahun 2013 sebesar Rp2.229.511.200,00 sehingga pada tahun 2013 jumlah total anggaran penerimaan SMKN 1 Tanjung adalah sebesar Rp5.482.686.032,00.

d.SMA Hasbunallah Tabalong

Kepala SMA Hasbunallah Tabalong Bapak H. Rifki Azhari, Lc sebagai penanggungjawab pengelolaan pembiayaan di madrasah menjelaskan proses penganggaran pembiayaan di SMA Hasbunallah Tabalong sebagai berikut:

“Proses penyusunan anggaran dimulai sejak bulan Januari setiap tahunnya. Kepala sekolah membentuk tim penyusun untuk membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang terdiri dari empat orang wakasek (wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana-prasarana, serta wakasek humas), kepala TU sekaligus selaku bendahara BOS, serta bendahara yayasan.”¹²⁸

¹²⁸Rabiatul Fitriah, Wakasek Kurikulum SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Wakasek tanggal 7 Mei 2014

Proses penganggaran pembiayaan dan penyusunan RKAS melalui informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak, yang dinyatakan berikut:

“Para guru, pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium, TU dan Wakasek diminta untuk menyampaikan rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang berlangsung, secara tertulis maupun lisan.”¹²⁹

Proses penganggaran pembiayaan tidak hanya melibatkan tim penyusun RKAS, namun juga terdapat peran para guru dan Komite Sekolah, serta Dinas Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Tim penyusun berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rancangan RKAS yang mereka buat. Selanjutnya rancangan tersebut dipresentasikan dalam rapat pertemuan dengan dewan guru untuk mendapatkan evaluasi dan saran tambahan, serta dikomunikasikan dan meminta persetujuan dari Komite Sekolah. Selanjutnya sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Kalau ternyata masih belum tepat, RKAS tersebut harus direvisi dulu.”¹³⁰

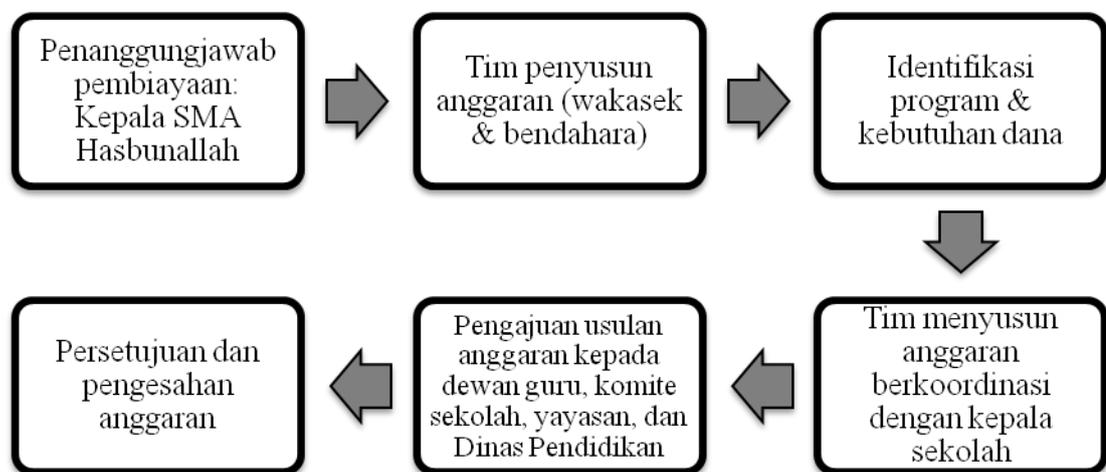
Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran pembiayaan di SMA Hasbunallah Tabalong dilaksanakan sejak awal Januari setiap tahun anggaran yang berlangsung, dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKAS yang terdiri dari kepala TU, wakasek dan bendahara. Tim penyusun RKAS mengakomodir masukan dari para guru dan dan wakasek, untuk yang merupakan informasi mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan.

¹²⁹Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

¹³⁰ Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

Tim penyusun membuat rancangan RKAS berdasarkan format yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Hasil rancangan RKAS tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Kemudian, sekolah mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Gambaran mengenai alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan di SMA Hasbunallah Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4 Alur Proses Penganggaran Pembiayaan di SMA Hasbunallah

Pada tahun 2013 SMA Hasbunallah Tabalong mendapatkan dana hibah bantuan operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp85.000,00/siswa/bulan atau sebesar Rp1.020.000,00/siswa/tahun. Sedangkan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat sebesar Rp560.000,00/siswa/tahun. Selain itu, SMA Hasbunallah Tabalong juga mendapat bantuan dana hibah pendampingan dari yayasan.

Sekretaris Yayasan Hasbunallah Tabalong Ibu Retno Isyuningsih, SE menyampaikan bahwa Yayasan Hasbunallah Tabalong berupaya menggali sumber

pembiayaan dari masyarakat, serta secara terbuka menerima donasi dan sumbangan dari berbagai sumber. Sejak awal dibangunnya yayasan dan sekolah Hasbunallah, PT. Pama Adaro Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan fisik bangunan, selain itu yayasan juga menjalin kerjasama dengan pihak luar, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Yayasan menjalin kerjasama dengan konsultan pendidikan Ummi Surabaya. Bantuan mereka tidak berupa dana mentah, namun berupa program pendampingan pendidikan, perbaikan manajemen dan kurikulum sekolah, Hasbunallah Qur’anic learning Center, dan sebagainya. Program dimulai sejak tahun 2014, dengan jangka waktu selama 4 tahun.”¹³¹

Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah di SMA Hasbunallah

Tabalung tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.12 RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMA HASBUNALLAH TABALONG TAHUN 2013

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	BOS Pusat	38.360.000	1.	Belanja Pegawai	264.642.625
2.	Hibah BOMM Kab.Tabalong	86.700.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	120.747.150
3.	Yayasan	266.939.775	3.	Belanja Modal	6.610.000
	Jumlah	391.999.775		Jumlah	391.999.775

Sumber: RKAS SMAN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menjelaskan bahwa sumber penerimaan anggaran di SMA Hasbunallah Tabalong adalah dana bantuan operasional dari pemerintah pusat sebesar Rp38.360.000,00 sedangkan dana hibah BOMM dari

¹³¹ Retno Isyuningsih, Sekretaris Yayasan Hasbunallah, Wawancara di ruang Yayasan Hasbunallah tanggal 2 Juni 2014

pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp86.700.000,00 dan dana hibah dari Yayasan Hasbunallah sebesar Rp266.939.775,00.

Hal itu berarti 9,79% biaya operasional sekolah berasal dari APBN sedangkan 22,12% biaya operasional sekolah berasal dari APBD Kabupaten Tabalong dan 68,10% biaya operasional sekolah berasal dari Yayasan Hasbunallah. Hal itu menunjukkan peran yayasan yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan.

SMA Hasbunallah Tabalong juga menerima anggaran rutin belanja PNS pada tahun 2013 sehingga jumlah total anggaran penerimaan SMA Hasbunallah Tabalong adalah sebesar Rp421.999.775,00 pada tahun 2013.

2. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

a. SMAN 1 Tanjung

Setelah proses penganggaran pembiayaan sekolah selesai dan RKAS disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan adalah penggunaan terhadap anggaran biaya yang telah dibuat dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam RKAS, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagaimana disampaikan Bendahara SMAN 1 Tanjung berikut:

“Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank penyalur. Selanjutnya Bank penyalur menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah.”¹³²

Dana yang telah diperoleh sekolah selanjutnya digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan program kegiatan melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah. Kepala SMAN 1 Tanjung menjelaskan bahwa proses pengeluaran dana di SMAN 1 Tanjung harus melalui beberapa tahap.

Penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mengajukan lembar permintaan tersebut langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana. Kepala sekolah akan melakukan pemeriksaan apakah pengajuan tersebut sesuai dengan RKAS, setelah itu kepala sekolah dapat menyetujuinya atau menolaknya. Setelah penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mendapat persetujuan kepala sekolah, selanjutnya mengajukannya kepada bendahara sekolah untuk mendapatkan pencairan dana, kemudian baru bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sekolah.¹³³

Hal senada disampaikan Bendahara SMAN 1 Tanjung sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

¹³² Aida Mulia, Bendahara I SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 6 Mei 2014

¹³³ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

“Masing-masing kan sudah ada peran dan pengelolanya. Misalnya kalau kegiatan kesiswaan ditangani oleh wakasek kesiswaan termasuk pengelolaan dananya, atau kalau ada permintaan dari TU untuk keperluan ATK, harus mengajukan dulu kepada wakasek sarana-prasarana. Setelah itu wakasek mengajukan permohonan dana kepada kepala sekolah, kalau sudah acc dapat persetujuan, dananya bisa diambil ke bendahara.”¹³⁴

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana bantuan yang diberikan pemerintah disalurkan langsung ke rekening sekolah. Selanjutnya dana yang telah diperoleh sekolah tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKAS, melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah. Gambaran mengenai alur proses penggunaan pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.5 Alur Penggunaan Pembiayaan di SMAN 1 Tanjung

Hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan dan penggunaan pembiayaan sekolah adalah aspek akunting atau pembukuan. Pembukuan

¹³⁴ Aida Mulia, Bendahara I SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 6 Mei 2014

merupakan keseluruhan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara kronologis dan teratur setiap transaksi yang dilakukan.

Tatacara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana harus dilakukan secara teliti dan transparan. Oleh karena itu, bendahara sekolah seharusnya menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat, serta pembukuan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala SMAN 1 Tanjung mengemukakan bahwa dalam menjalankan tanggungjawab sebagai kepala sekolah harus dibantu oleh orang yang profesional, bisa kerja dan menyelesaikan masalah, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Kriteria untuk bendahara tidak mesti latar belakang akuntansi atau keuangan. Salah satu bendahara kami adalah Ibu Aida Mulia, beliau adalah guru matematika sekaligus menjabat wakasek sarana prasarana. Namun beliau yang sejak dulu mengurus dan memahami pengelolaan BOS.”¹³⁵

Kemampuan seorang bendahara menjalankan tugasnya mengelola pembukuan dan penggunaan pembiayaan sekolah memang merupakan hal yang penting. Namun pihak pengelola pendidikan di SMAN 1 Tanjung juga harus mempertimbangkan agar jabatan rangkap bendahara sekaligus wakasek sarana prasarana tidak menghambat pelaksanaan tugas masing-masing.

Hambatan yang biasa dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana

¹³⁵ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak.

Data penelitian menunjukkan terdapat ketentuan bahwa penyaluran dana bantuan dari pemerintah pusat dilakukan dalam dua tahap penyaluran yaitu periode Januari-Juni 2013 dan periode Juli-Desember 2013, sedangkan penyaluran dana bantuan dari pemerintah kabupaten dilakukan setiap periode triwulan. Bendahara SMAN 1 Tanjung menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk masalah penyaluran dana masih mengalami keterlambatan. Dana seharusnya sudah keluar bulan Juli. Namun kenyataannya dana baru keluar bulan September dan baru bisa digunakan bulan November. Otomatis pembiayaan Juli-Oktober memerlukan sumber pembiayaan lain.”¹³⁶

Untuk mengatasi hal tersebut, SMAN 1 Tanjung melakukan beberapa cara agar program sekolah dapat terus berjalan walaupun belum memperoleh bantuan dana dari pemerintah, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Kami biasanya menggunakan dana talangan dari Koperasi Sekolah. Alhamdulillah koperasi disini aktif, dibina oleh guru yang ditunjuk dan dikelola langsung oleh pengurus yang berasal dari siswa. Bahkan Koperasi SMAN 1 Tanjung pernah menjuarai lomba koperasi sekolah tingkat nasional. Dana dari koperasi dapat digunakan sementara untuk berbagai keperluan sekolah yang mendesak.”¹³⁷

Dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan

¹³⁶ Aida Mulia, Bendahara I SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 6 Mei 2014

¹³⁷ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

pencairan dana ataupun karena masih kurangnya dana yang diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Kami melakukan pengetatan dalam pengeluaran dana. Misalnya ada kegiatan persami pramuka. Anggaran yang tersedia hanya Rp1.000.000,00 sedangkan dana yang diperlukan sebesar Rp1.500.000,00. Maka kita panggil pembina pramuka dan wakasek kesiswaan. Misalnya dana untuk pembina dikurangi menjadi Rp250.000,00 saja, sisanya Rp750.000,00 untuk keperluan anak. Kalau dana masih kurang, pembina harus bisa mencukup-cukupkan.”¹³⁸

Jika dengan kedua cara tersebut sekolah masih kekurangan dana, baik dengan dana talangan dari Koperasi Sekolah maupun dengan pengetatan dalam pengeluaran dana. Selanjutnya SMAN 1 Tanjung berusaha menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Jika sekolah mengalami kekurangan dana khususnya jika ada program insidental, seperti acara perpisahan siswa, peralatan praktik siswa, dan sebagainya, maka kami mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan menyampaikan kekurangan dana. Orang tua siswa biasanya tidak keberatan memberikan sumbangan sukarela, karena digunakan untuk keperluan siswa juga. Bahkan kelas Aksel pun dibiayai swadaya.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pembelajaran telah memadai, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

¹³⁸ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

¹³⁹ Tonie Marwan, Wakasek Manajemen Mutu SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 25 April 2014

“Sekolah kami sudah memiliki ruang multimedia. Setiap ruang kelas juga telah dipasang LCD di dalamnya sehingga guru ngajar tinggal bawa laptop saja. Sarana sudah siap di ruang kelas, guru tidak perlu repot membawa LCD kemana-mana.”¹⁴⁰

SMAN 1 Tanjung berupaya menggunakan pembiayaan sekolah untuk kepentingan pembelajaran dan peningkatan kualitas sekolah. Selain adanya peran guru yang kompeten, manajemen sekolah yang terus diperbaiki sesuai standar ISO, serta menyediakan fasilitas yang memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran.

b.MAN 1 Tanjung

Setelah proses penganggaran pembiayaan madrasah selesai dan RKAM disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan adalah penggunaan terhadap anggaran biaya yang telah dibuat dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah.

Untuk dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam RKAM, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagaimana disampaikan Kepala TU MAN 1 Tanjung berikut:

“Penyaluran dana dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank penyalur. Selanjutnya Bank penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening madrasah.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

¹⁴¹ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

Dana yang telah diperoleh sekolah selanjutnya digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan program kegiatan melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di madrasah. Bendahara MAN 1 Tanjung menjelaskan bahwa proses pengeluaran dana di MAN 1 Tanjung harus melalui beberapa tahap. Penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mengajukan lembar permintaan tersebut langsung kepada kepala madrasah untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana. Kepala madrasah akan melakukan pemeriksaan apakah pengajuan tersebut sesuai dengan RKAM, setelah itu kepala madrasah dapat menyetujuinya atau menolaknya. Setelah penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mendapat persetujuan kepala madrasah, selanjutnya mengajukannya kepada bendahara untuk mendapatkan pencairan dana, kemudian baru bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan madrasah.¹⁴²

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana yang diberikan pemerintah disalurkan langsung ke rekening madrasah. Selanjutnya dana yang telah diperoleh madrasah tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKAM, melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di madrasah. Gambaran mengenai alur proses penggunaan pembiayaan pendidikan di MAN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁴² Milda Herawati, Bendahara I MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014



Gambar 4.6 Alur Penggunaan Pembiayaan di MAN 1 Tanjung

Dalam manajemen madrasah, pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan juga meliputi akunting atau pembukuan. Pembukuan merupakan keseluruhan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara kronologis dan teratur setiap transaksi yang dilakukan.

Tatacara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana harus dilakukan secara teliti dan transparan. Oleh karena itu, bendahara sekolah seharusnya menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat, serta pembukuan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala MAN 1 Tanjung menuturkan sebagai berikut:

“Ada dua bendahara di MAN 1 Tanjung. Bendahara DIPA adalah Ibu Milda, beliau adalah staf pelaksana TU. Sedangkan bendahara BOMM Daerah dari tenaga guru, yaitu ibu Yuni, beliau adalah guru matematika, supaya lebih cepat urusan hitung menghitung.”¹⁴³

¹⁴³ Alhamayu, Kepala MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Madrasah tanggal 10 Mei 2014

Kemampuan bendahara menjalankan tugasnya mengelola pembukuan dan penggunaan pembiayaan madrasah memang merupakan hal yang penting. Proses pembukuan yang berjalan dengan baik tentu akan mendukung terselenggaranya pengelolaan pembiayaan yang optimal.

Hambatan yang biasa dihadapi oleh madrasah dalam pelaksanaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan madrasah yang banyak, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Dana DIPA biasanya tidak ada keterlambatan. Sejak awal tahun anggaran, dana sudah kita miliki, terserah kapan mau mengambil. Sedangkan BOMM Daerah, seharusnya pencairan setiap triwulan, namun suka telat.”¹⁴⁴

Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana, MAN 1 Tanjung melakukan beberapa cara agar program kegiatan madrasah dapat terus berjalan walaupun belum memperoleh bantuan dana dari pemerintah, seperti dana talangan dari individu ataupun dari koperasi yang jumlahnya tidak begitu besar.¹⁴⁵

Dalam pelaksanaan program kegiatan madrasah, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Dalam teori seharusnya pos anggaran harus masuk ke masing-masing, misal pos pemeliharaan, ATK, dsb. Namun dalam keadaan terdesak, bisa saja kita alihkan ke anggaran lain, atau tambal sulam. Untuk menanggulangi jika ada pos anggaran lain yang harus didahulukan. Apalagi kalau untuk pembayaran honor harus *on time*, kalau tidak maka gurunya bisa tidak ngajar.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

¹⁴⁵ Alhamayu, Kepala MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Madrasah tanggal 10 Mei 2014

¹⁴⁶ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

MAN 1 Tanjung juga masih melibatkan peran orang tua siswa jika madrasah masih kekurangan dana. Madrasah akan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa jika madrasah mengalami kekurangan biaya dan meminta persetujuan pemberian bantuan dana sukarela dari orang tua siswa.¹⁴⁷ Selain itu, data penelitian menunjukkan bahwa OSIS MAN 1 Tanjung juga masih menggali sumber pembiayaan dari internal siswa, padahal sudah ada pos anggaran untuk pembinaan kegiatan kesiswaan dalam RKAM, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“OSIS ada pendanaan mandiri selain dana madrasah, karena dana madrasah terbatas. Ada iuran rutin per siswa setiap minggu (setiap hari senin) sebesar Rp 1.000. Dana ini digunakan khusus untuk kegiatan OSIS, sedangkan kalau ada musibah dan sebagainya, ada infaq sukarela setiap hari jumat.”¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pembelajaran belum memadai, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“LCD yang dimiliki sekolah awalnya ada 9 buah, kini hanya tinggal 1 saja jadi menggunakannya harus bergantian. Karena LCD dibawa kemana-mana, ada yang bisa menggunakan dan ada yang tidak, jadi mudah rusak. Seandainya keamanan terjamin, tinggal gantung di kelas saja, ada 9 buah kelas. Tapi kita ga berani karena tidak bisa menjamin keamanannya.”¹⁴⁹

¹⁴⁷ Alhamayu, Kepala MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Madrasah tanggal 10 Mei 2014

¹⁴⁸ Siti Khairiyah, Wakasek Kesiswaan MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang guru tanggal 30 Mei 2014

¹⁴⁹ Siti Khairiyah, Wakasek Kesiswaan MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang guru tanggal 30 Mei 2014

Kepala TU MAN 1 Tanjung menuturkan sebagai berikut:

“Jurusan agama baru saja dibentuk. Lulusan angkatan pertama tahun 2014 nanti. Dulu mau bikin jurusan itu, tapi kelas nya masih kurang. Setelah kita usulkan, baru dapat bantuan dari Disdik provinsi.”¹⁵⁰

MAN 1 Tanjung yang berdiri sejak tahun 1968, pada usianya yang sudah tergolong cukup tua belum mampu menyediakan fasilitas belajar yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.

c. SMKN 1 Tanjung

Setelah proses penganggaran pembiayaan sekolah selesai dan RKAS disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan adalah penggunaan terhadap anggaran biaya yang telah dibuat dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam RKAS, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagaimana disampaikan Bendahara SMKN 1 Tanjung berikut:

“Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank penyalur. Selanjutnya Bank penyalur menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

¹⁵¹ Arie Wibowo, Bendahara II SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

Dana yang telah diperoleh sekolah selanjutnya digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan program kegiatan melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah. Proses pengeluaran dana di SMAN 1 Tanjung harus melalui beberapa tahap. Penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mengajukan lembar permintaan tersebut langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana. Kepala sekolah akan melakukan pemeriksaan apakah pengajuan tersebut sesuai dengan RKAS, setelah itu kepala sekolah dapat menyetujuinya atau menolaknya. Setelah penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mendapat persetujuan kepala sekolah, selanjutnya mengajukannya kepada Bendahara Sekolah untuk mendapatkan pencairan dana, kemudian baru bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sekolah.¹⁵²

Staf Wakasek Manajemen Mutu SMKN 1 Tanjung menyampaikan sebagai berikut:

“Kami sudah punya struktural dan peran masing-masing wakasek. Staf WMM ada juga petugas lapangan yang melakukan pengawasan setiap kelas tiga kali dalam sehari. Hal ini dalam rangka pemenuhan standar ISO untuk pemenuhan kepuasan dan keluhan pelanggan. Jika berkaitan dengan pembelajaran laporannya kami sampaikan ke bidang kurikulum, sedangkan kalau berkaitan pemenuhan fasilitas kelas kami sampaikan ke bidang sarana-prasarana.”¹⁵³

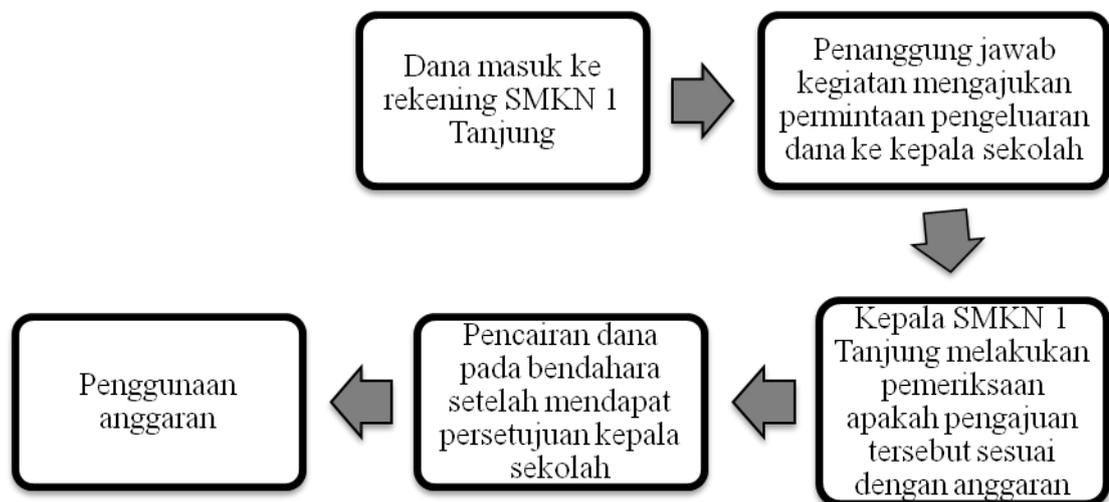
Wakasek Sarana-Prasarana SMKN 1 Tanjung menuturkan pernyataan sebagai berikut:

¹⁵² Arie Wibowo, Bendahara II SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

¹⁵³ Lindawati, staf Wakasek Manajemen Mutu SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

“Kami melakukan tugas penerimaan barang (pembelian barang oleh sekolah maupun bantuandari pusat atau hibah manapun). Setelah kami terima, inventarisasi, lalu dibagikan ke masing-masing sesuai keperluan dan unit kerja. Untuk memfasilitasi permintaan kebutuhan barang dan sarana setiap unit kerja, maka setiap tiga bulan sekali ada formulir yang kami bagikan, untuk mendata kebutuhan rutin yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu tersebut, supaya memudahkan kami juga untuk mengajukan permohonan pencairan dana. Waktu pendataan ini kami sesuaikan dengan pencairan dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah secara triwulan.”¹⁵⁴

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana bantuan yang diberikan pemerintah disalurkan langsung ke rekening sekolah. Selanjutnya dana yang telah diperoleh sekolah tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKAS, melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah. Gambaran mengenai alur proses penggunaan pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.7 Alur Penggunaan Pembiayaan di SMKN 1 Tanjung

¹⁵⁴ Sunaryo, Wakasek Sarana-Prasarana SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Wakil Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

Dalam manajemen sekolah, pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan juga meliputi aspek akunting atau pembukuan. Pembukuan merupakan keseluruhan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara kronologis dan teratur setiap transaksi yang dilakukan.

Tatacara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana harus dilakukan secara teliti dan transparan. Oleh karena itu, bendahara sekolah seharusnya menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat, serta pembukuan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala SMKN 1 Tanjung menjelaskan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya harus dibantu oleh orang yang profesional dan ahli. Dua orang bendahara di SMKN 1 Tanjung berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi, karena jika bukan orang yang ahli maka akan berbeda dengan profesional yang memahami bidangnya.¹⁵⁵

Kemampuan bendahara menjalankan tugasnya mengelola pembukuan dan penggunaan pembiayaan madrasah memang merupakan hal yang penting. Proses pembukuan yang berjalan dengan baik tentu akan mendukung terselenggaranya pengelolaan pembiayaan yang optimal.

Hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak.

¹⁵⁵ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

Untuk mengatasi hal tersebut, SMKN 1 Tanjung melakukan beberapa cara agar program kegiatan sekolah dapat terus berjalan walaupun belum memperoleh bantuan dana dari pemerintah, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Kami menggunakan dana talangan bantuan dari unit kerja produktif setiap program keahlian, penyewaan aula sekolah untuk umum, bantuan dari individu, ataupun menggunakan dana dari alokasi pos anggaran lain yang belum mendesak untuk digunakan.”¹⁵⁶

SMKN 1 Tanjung juga memiliki program kegiatan yang bernama Gerakan Seribu Siswa, berupa sumbangan rutin sukarela dari para siswa yang bertujuan untuk mendidik siswa berjiwa sosial. Dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan seperti jika ada orangtua siswa meninggal, kecelakaan, dan sebagainya.

Jika sekolah masih kekurangan dana maka SMKN 1 Tanjung berusaha menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Dana pemerintah untuk keperluan praktek siswa terbatas dan masih kurang. Misalnya TKJ perlu komponen-komponen untuk perakitan. Jadi kami panggil orang tua siswa, minta persetujuan orang tua siswa. Khusus siswa TKJ harus beli komponen sendiri, merakit membuat komputer sendiri, namun itu menjadi hak miliknya sendiri. Jadi setiap hari praktek, memakai milik dia sendiri, sehingga dia bertanggungjawab karena miliknya sendiri.”¹⁵⁷

Pertemuan rutin dengan komite sekolah dan orang tua siswa rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali, bertepatan dengan pembagian rapot hasil

¹⁵⁶ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

¹⁵⁷ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

belajar siswa yang memang dilakukan empat kali dalam setahun, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Setiap ada kekurangan dana dan kegiatan insidental kami musyawarahkan dengan orang tua siswa terlebih dahulu. Orang tua biasanya setuju saja memberikan sumbangan sukarela sesuai kemampuan, karena hal ini untuk kepentingan siswa juga. Kami selalu sampaikan tujuannya. Dengan adanya partisipasi orang tua siswa, begini lah sekolah jadinya, ada hasil signifikan yang terlihat. Kalau tidak ada partisipasi, ya seadanya saja.”¹⁵⁸

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber berusaha digunakan SMKN 1 Tanjung secara efektif dan efisien, dan sasaran penggunaan dana tersebut harus sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah.

“Sasaran penggunaan dana program kegiatan pembinaan siswa tidak hanya untuk kegiatan lomba dan ekstrakurikuler saja, akan tetapi juga untuk kegiatan pembentukan karakter religius. Sekolah selalu mengadakan pengajian setiap pagi, selain itu program sholat hajat rutin dilakukan setiap bulan, tidak hanya jika menjelang Ujian Nasional saja.”¹⁵⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 1 Tanjung telah memadai. Hal itu terlihat dengan gedung bangunan sekolah yang megah dan beragam fasilitas yang menunjang pembelajaran.

d.SMA Hasbunallah Tabalong

Setelah perencanaan pembiayaan sekolah selesai dan RKAS disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen

¹⁵⁸ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

¹⁵⁹ Mulyadi, Kepala TU SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

pembiayaan adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan sekolah.

Untuk dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam RKAS, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagaimana disampaikan Bendahara SMA Hasbunallah Tabalong berikut:

“Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank penyalur. Selanjutnya Bank penyalur menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah.”¹⁶⁰

Adapun proses pengeluaran dana dari Yayasan Hasbunallah, sekolah harus mengajukan permohonan proposal kegiatan bulanan dan mendapat persetujuan minimal dua orang dari pengurus yayasan, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Setiap awal tahun, yayasan juga meminta sekolah membuat program tahunan. Selanjutnya pihak yayasan akan menganalisa apakah program kegiatan dan kebutuhan dana sekolah tersebut memang penting dan mendesak atau tidak. Dana hibah yayasan diberikan setiap bulan kepada sekolah jika sekolah mengajukan permohonan.”¹⁶¹

Meskipun sudah mendapat dana bantuan operasional dari pemerintah, namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya sebesar Rp300.000,00 yang disetorkan ke yayasan. Sekretaris Yayasan Hasbunallah menuturkan sebagai berikut:

¹⁶⁰ Yuni Astuti, Bendahara I SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang guru tanggal 7 Mei 2014

¹⁶¹ Retno Isyuningsih, Sekretaris Yayasan Hasbunallah, Wawancara di ruang Yayasan Hasbunallah tanggal 2 Juni 2014

“SPP siswa dari setiap unit sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA) memang dibayarkan ke rekening yayasan (bukan rekening masing-masing sekolah). Yayasan yang mengelola dana dari orang tua tersebut. Selanjutnya, yayasan akan mendistribusikan alokasi dana dan subsidi silang sesuai kebutuhan kepada setiap unit sekolah. Apalagi SMA Hasbunallah kan masih baru dan jumlah siswanya masih sedikit, jadi masih banyak mendapat subsidi silang dari penerimaan dana unit sekolah lainnya.”¹⁶²

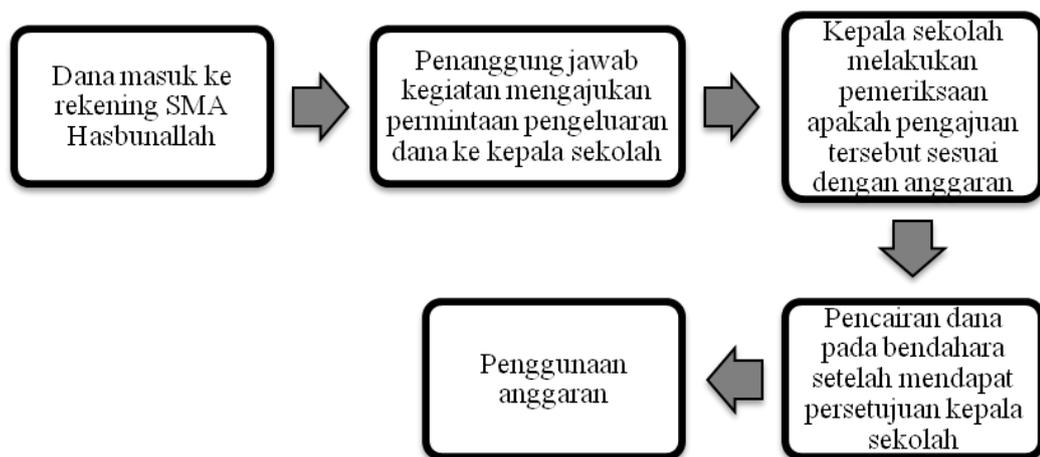
Dana yang telah diperoleh sekolah selanjutnya digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan program kegiatan melalui penyaluran anggaran kepada unit kerja tertentu di sekolah. Kepala SMA Hasbunallah Tabalong menjelaskan bahwa proses pengeluaran dana di SMA Hasbunallah Tabalong harus melalui beberapa tahap. Penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mengajukan lembar permintaan tersebut langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana. Kepala sekolah akan melakukan pemeriksaan apakah pengajuan tersebut sesuai dengan RKAS, setelah itu kepala sekolah dapat menyetujuinya atau menolaknya. Setelah penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mendapat persetujuan kepala sekolah, selanjutnya mengajukannya kepada bendahara untuk mendapatkan pencairan dana, kemudian baru bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sekolah.¹⁶³

Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana bantuan yang diberikan pemerintah disalurkan langsung ke rekening sekolah. Selanjutnya dana yang telah diperoleh sekolah tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang

¹⁶² Retno Isyuningsih, Sekretaris Yayasan Hasbunallah, Wawancara di ruang Yayasan Hasbunallah tanggal 2 Juni 2014

¹⁶³ Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

ada dalam RKAS, melalui penyaluran anggaran kepada unit kerja tertentu di sekolah. Gambaran mengenai alur proses penggunaan pembiayaan pendidikan di SMA Hasbunallah Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.8 Alur Penggunaan Pembiayaan di SMA Hasbunallah Tabalong

Dalam manajemen sekolah, pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan juga meliputi akunting atau pembukuan. Pembukuan merupakan keseluruhan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara kronologis dan teratur setiap transaksi yang dilakukan.

Tatacara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana harus dilakukan secara teliti dan transparan. Oleh karena itu, bendahara sekolah seharusnya menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat, serta pembukuan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala SMA Hasbunallah Tabalong menuturkan sebagai berikut:

“Bendahara BOS kami adalah Ibu Yuni, beliau juga sekaligus menjabat sebagai kepala TU, namun beliau yang sejak dulu mengurus dan memahami pengelolaan BOS. Karena SDM sekolah kami terbatas. Sedangkan bendahara yayasan adalah ibu Wiwin yang sekaligus sebagai staf TU.”¹⁶⁴

Kemampuan bendahara menjalankan tugasnya mengelola pembukuan dan penggunaan pembiayaan madrasah memang merupakan hal yang penting. Proses pembukuan yang berjalan dengan baik tentu akan mendukung terselenggaranya pengelolaan pembiayaan yang optimal.

Hambatan yang biasa dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut, SMA Hasbunallah Tabalong melakukan beberapa cara agar program kegiatan sekolah dapat terus berjalan walaupun belum memperoleh bantuan dana dari pemerintah, dengan dana talangan dari individu ataupun dari yayasan.

Kepala SMA Hasbunallah Tabalong menjelaskan bahwa jika terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan dari pemerintah, sekolah menggunakan dana hibah pendampingan dari yayasan. Tujuan awal adanya dana hibah yayasan ini sifatnya untuk membantu jika dana BOS dari pemerintah masih kurang atau terlambat proses pencairannya, sedangkan sekolah tetap harus berkegiatan.¹⁶⁵

Dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari

¹⁶⁴ Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

¹⁶⁵ Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

jumlah yang telah dianggarkan. Hal itu disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana ataupun karena masih kurangnya dana yang diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Dana yang ada harus dicukup-cukupkan. Kalau dananya kurang, maka harus ditekan pengeluarannya atau tambal sulam dengan anggaran lain. Misalnya jika anggaran yang tersedia hanya Rp 1.000.000 sedangkan ternyata yang diperlukan sebesar Rp 1.500.000. Maka ada pos anggaran lain yang harus kami kurangi. Nanti akan ada revisi RKAS terkait hal tersebut.”¹⁶⁶

SMA Hasbunallah Tabalong juga berusaha menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa jika terdapat keperluan insidental seperti keperluan kelas, acara perpisahan, dan sebagainya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari orang tua siswa.¹⁶⁷

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber berusaha digunakan SMA Hasbunallah Tabalong agar sasaran penggunaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah.

SMA Hasbunallah yang berdiri sejak tahun 2009, pada usianya yang masih sangat muda, berupaya menyediakan fasilitas belajar yang memadai bagi seluruh siswa serta terus meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan.

3. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

a. SMAN 1 Tanjung

¹⁶⁶ Yuni Astuti, Bendahara I SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang guru tanggal 7 Mei 2014

¹⁶⁷ Rifki Azhari, Kepala SMA Hasbunallah Tabalong, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 7 Mei 2014

Semua pengeluaran keuangan yang berasal dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus dijunjung tinggi, hal ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Pertanggungjawaban pembiayaan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah. Proses ini menyangkut pertanggung-jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayar-an atau penyerahan dana kepada pihak yang berwenang.

SMAN 1 Tanjung melakukan kontrol dan pengawasan internal melalui kepala sekolah dan wakasek manajemen mutu. Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru setiap triwulan, sedangkan pertemuan dengan komite sekolah dan orang tua siswa dilakukan setiap enam bulan sekali.¹⁶⁸

Pemeriksaan terhadap kas pembukuan dilakukan setiap bulannya yang bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah uang dan melihat catatan dana yang ada dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang, maka bendahara harus dapat menjelaskannya.

Bendahara sekolah tidak hanya mencatat anggaran dan melakukan proses pembukuan setiap harinya, namun juga harus menyampaikan realisasinya dan membuat laporan keuangan. Kepala sekolah selaku penanggungjawab

¹⁶⁸ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

pembiayaan sekolah, melalui bendahara diwajibkan membuat laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru setiap triwulan, sedangkan pertemuan dengan komite dan orang tua siswa dilakukan setiap semester. Laporan keuangan disampaikan bendahara kepada kepala sekolah. Selanjutnya sekolah juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong per triwulan maupun Direktorat Pembinaan SMA Kemendiknas per semester.¹⁶⁹

Dengan adanya laporan ini, dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Laporan ini memungkinkan kepala sekolah selalu mengetahui keadaan keuangan sekolah dan secara bersamaan membuat perbandingan keuangan dengan tahun lalu atau bulan sebelumnya dari tahun anggaran.

b. MAN 1 Tanjung

Semua pengeluaran keuangan yang berasal dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan oleh madrasah. Prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus dijunjung tinggi, hal ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di madrasah.

¹⁶⁹ Rusdi Yusran, Kepala SMAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2014

Pertanggungjawaban pembiayaan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran madrasah. Proses ini menyangkut pertanggung-jawaban penerimaan, penyimpanan dan pemba-yaran atau penyerahan dana kepada pihak yang berwenang.

MAN 1 Tanjung melakukan kontrol dan pengawasan internal melalui kepala madrasah. Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru maupun pertemuan dengan komite dan orang tua siswa.

Kepala MAN 1 Tanjung menuturkan sebagai berikut:

“Setiap minggu harus ada pemeriksaan supaya bisa terus kita kontrol, untuk melihat dan mengecek catatan pengeluaran telah digunakan untuk apa aja. Kalau setiap bulan kan bendahara tinggal menyerahkan laporannya saja.”

¹⁷⁰

Pemeriksaan terhadap pembukuan kas dilakukan untuk menguji kebenaran jumlah uang dan melihat catatan dana yang ada dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang, maka bendahara harus dapat menjelaskannya.

Bendahara madrasah tidak hanya mencatat anggaran dan melakukan proses pembukuan setiap harinya, namun juga harus menyampaikan realisasinya dan membuat laporan keuangan. Kepala madrasah selaku penanggungjawab pembiayaan madrasah, melalui bendahara diwajibkan membuat laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

¹⁷⁰ Alhamayu, Kepala MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Madrasah tanggal 10 Mei 2014

Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru, sedangkan pertemuan dengan komite dan orang tua siswa dilakukan setiap semester. Laporan keuangan disampaikan bendahara kepada kepala sekolah. Selanjutnya sekolah juga harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong per triwulan maupun kepada Kementerian Agama per semester.¹⁷¹

Dengan adanya laporan ini, dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Laporan ini memungkinkan kepala madrasah selalu mengetahui keadaan keuangan madrasah dan secara bersamaan membuat perbandingan keuangan dengan tahun lalu atau bulan sebelumnya dari tahun anggaran.

c. SMKN 1 Tanjung

Semua pengeluaran keuangan yang berasal dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus dijunjung tinggi, hal ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Pertanggungjawaban pembiayaan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah. Proses ini menyangkut pertanggung-jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayar-an atau penyerahan dana kepada pihak yang berwenang.

¹⁷¹ Rais, Kepala TU MAN 1 Tanjung, Wawancara di ruang TU tanggal 10 Mei 2014

Pemeriksaan terhadap kas pembukuan juga dilakukan setiap bulannya yang bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah uang dan melihat catatan dana yang ada dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang, maka bendahara harus dapat menjelaskannya.

Bendahara sekolah tidak hanya mencatat anggaran dan melakukan proses pembukuan setiap harinya, namun juga harus menyampaikan realisasinya dan membuat laporan keuangan. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pembiayaan sekolah, melalui bendahara diwajibkan membuat laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

SMKN 1 Tanjung melakukan kontrol dan pengawasan internal melalui kepala sekolah dan wakasek masing-masing bidang. Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru setiap bulan, sedangkan pertemuan dengan komite dan orang tua siswa dilakukan setiap tiga bulan sekali. Laporan keuangan disampaikan bendahara kepada kepala sekolah. Selanjutnya sekolah juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong per triwulan maupun Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas per semester.¹⁷²

Dengan adanya laporan ini, dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Laporan ini memungkinkan kepala sekolah selalu mengetahui keadaan keuangan sekolah dan

¹⁷² Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

secara bersamaan membuat perbandingan keuangan dengan tahun lalu atau bulan sebelumnya dari tahun anggaran.

Kepala TU SMKN 1 Tanjung menuturkan sebagai berikut:

“Karena SMKN 1 Tanjung menerapkan standar ISO, audit juga dilakukan setiap tahun oleh badan yang mengaudit. Sebelumnya kami menyiapkan diri dengan melakukan audit internal sekolah dilakukan setiap semester yang dikoordinir wakasek manajemen mutu.”¹⁷³

Kepala SMKN 1 Tanjung menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dana *Invest* tidak hanya dengan membuat laporan dan SPJ saja, namun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga datang untuk memeriksa langsung disetiap akhir program yang dilaksanakan.¹⁷⁴

d.SMA Hasbunallah Tabalong

Semua pengeluaran keuangan yang berasal dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus dijunjung tinggi, hal ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Pertanggungjawaban pembiayaan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah. Proses ini menyangkut pertanggung-jawaban penerimaan, penyimpanan dan pemba-yaran atau penyerahan dana kepada pihak yang berwenang.

¹⁷³ Mulyadi, Kepala TU SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

¹⁷⁴ Bambang Wahono, Kepala SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 2014

SMA Hasbunallah Tabalong melakukan kontrol dan pengawasan internal melalui kepala sekolah dan pihak yayasan. Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan disampaikan pada rapat dengan dewan guru setiap dua bulan, serta pertemuan dengan komite dan orang tua siswa setiap semester.

Sekretaris Yayasan Hasbunallah menjelaskan bahwa dalam struktur yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Tugas pengawas untuk mengawasi dana sekolah maupun dana yayasan sendiri.¹⁷⁵

Pemeriksaan terhadap kas pembukuan juga dilakukan untuk menguji kebenaran jumlah uang dan melihat catatan dana yang ada dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang, maka bendahara harus dapat menjelaskannya.

Bendahara sekolah tidak hanya mencatat anggaran dan melakukan proses pembukuan setiap harinya, namun juga harus menyampaikan realisasinya dan membuat laporan keuangan. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pembiayaan sekolah, melalui bendahara diwajibkan membuat laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Dengan adanya laporan ini, dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Laporan ini memungkinkan kepala sekolah selalu mengetahui keadaan keuangan sekolah dan secara bersamaan membuat perbandingan keuangan dengan tahun lalu atau bulan sebelumnya dari tahun anggaran.

¹⁷⁵ Retno Isyuningsih, Sekretaris Yayasan Hasbunallah, Wawancara di ruang Yayasan Hasbunallah tanggal 2 Juni 2014

Laporan keuangan disampaikan bendahara kepada kepala sekolah. Selanjutnya sekolah juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong per triwulan maupun Direktorat pembinaan SMA Kemendiknas per semester, serta kepada Yayasan Hasbunallah.

Sekretaris Yayasan Hasbunallah menjelaskan prosedur pertanggung-jawaban di SMA Hasbunallah yang dinyatakan dalam penuturan berikut:

“Laporan pertanggungjawaban pembiayaan sekolah ke pemerintah harus disampaikan juga ke pihak yayasan, agar yayasan mengetahui sekolah mendapat bantuan apa saja. Pembiayaan kegiatan apa pun yang dilakukan sekolah juga harus dilaporkan, baik dananya lebih ataupun kurang. Namun saat ini belum berjalan efektif. Pengarsipan dan validitas masih kurang, karena ada yang tidak didukung bukti tertulis, khususnya jika ada pengeluaran insidental diluar anggaran.”¹⁷⁶

Hal itu menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban untuk menjalin kepercayaan pihak pemberi dana. Laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi bukti pengeluaran yang sah menunjukkan validitas dan transparansi pengelolaan pembiayaan di sekolah.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai deskripsi hasil penelitian, ada beberapa temuan menarik yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong memulai proses penganggaran pembiayaan sejak awal tahun anggaran berlangsung, yaitu sekitar bulan Januari. Sedangkan SMKN 1 Tanjung memulai proses penganggaran pembiayaan sebelum awal tahun anggaran

¹⁷⁶ Retno Isyuningsih, Sekretaris Yayasan Hasbunallah, Wawancara di ruang Yayasan Hasbunallah tanggal 2 Juni 2014

berlangsung, sehingga sekitar bulan Desember 2012 sekolah tersebut sudah mulai menyiapkan perencanaan untuk penyusunan anggaran tahun 2013. SMAN 1 Tanjung membentuk tim penyusun RKAS yang terdiri dari wakasek dan bendahara. Sedangkan MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong memiliki tim penyusun RKAS/RKAM yang terdiri dari wakasek, kepala TU, dan bendahara. SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung melibatkan wakasek manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sekolah berdasar standar ISO.

2. Pada tahun 2013 SMAN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah mendapatkan dana BOMM Kabupaten Tabalong sebesar Rp85.000,00/siswa sedangkan SMKN 1 Tanjung memperoleh Rp90.000/siswa dan MAN 1 Tanjung memperoleh Rp75.000,00/siswa. Adapun bantuan operasional dari pemerintah pusat diperoleh MAN 1 Tanjung melalui Kementerian Agama yang telah dialokasikan ke dalam dana DIPA. Dana DIPA tersebut meliputi gaji PNS, dana BOS Pusat, maupun komponen operasional lainnya selain alokasi anggaran dana BOS.
3. SMA Hasbunallah Tabalong merupakan sekolah swasta yang juga mendapatkan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Tabalong. Walaupun demikian, SMA Hasbunallah tetap membebankan biaya pendidikan Rp300.000,00/siswa/bulan yang dikelola oleh yayasan.
4. SMAN 1 Tanjung dan MAN 1 Tanjung mengatasi kekurangan dan keterlambatan pencairan dana pembiayaan pendidikan menggunakan dana

talangan dari koperasi sekolah. Adapun SMKN 1 Tanjung mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan dana talangan dari unit kerja produktif sekolah maupun penyewaan aula sekolah untuk umum. Sedangkan SMA Hasbunallah menggunakan dana talangan hibah dari yayasan. Selain itu MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah, sama-sama menggunakan dana talangan bantuan dari individu ataupun menggunakan dana dari alokasi pos anggaran lain yang belum mendesak, untuk mengatasi kekurangan dana di sekolah. Jika dengan berbagai cara tersebut sekolah/madrasah masih kekurangan dana, maka keempat sekolah menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa.

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa semua hasil temuan penelitian yang disajikan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang terdiri dari: (a) penganggaran pembiayaan pendidikan, (b) penggunaan pembiayaan pendidikan, dan (c) pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

A. Penganggaran Pembiayaan pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

1. Kompetensi Pengelola Anggaran Pendidikan

Penelitian ini menemukan bahwa proses penganggaran pembiayaan dimulai sejak awal tahun anggaran berlangsung, yaitu sekitar bulan Januari. Hal ini dilakukan di SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, maupun SMA Hasbunallah Tabalong. Sedangkan proses penganggaran pembiayaan di SMKN 1 Tanjung dimulai sebelum awal tahun anggaran berlangsung, sehingga sekitar bulan Desember 2012 sekolah tersebut sudah mulai menyiapkan perencanaan untuk penyusunan anggaran tahun 2013.

Perbedaan waktu seperti disebutkan di atas menunjukkan faktor kesiapan sekolah untuk melakukan perencanaan dan proses penganggaran pembiayaan

pendidikan. Hal ini dikuatkan oleh Bendahara SMKN 1 Tanjung bahwa sekolah berusaha menyiapkan rancangan RKAS sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.¹⁷⁷ Dengan demikian sejak akhir semester tahun sebelumnya, sekolah telah mengevaluasi proses pembiayaan yang telah berlangsung dan mulai mempersiapkan perencanaan dan proses penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya. Persiapan waktu demikian akan membuat proses pengelolaan sekolah berjalan lancar dan tidak tergesa-gesa, karena sekolah harus merencanakan pengelolaan berbasis penilaian kebutuhan sekolah tersebut.

Penelitian ini juga menemukan perbedaan dalam pembentukan tim penyusun anggaran atau tim penyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Kepala SMAN 1 Tanjung membentuk tim penyusun RKAS terdiri dari wakasek dan bendahara, yang dikoordinir oleh wakasek manajemen mutu. Sedangkan MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong memiliki tim penyusun RKAS/RKAM yang terdiri dari wakasek, kepala TU, dan bendahara.

Keterlibatan peran guru dan Komite Sekolah dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKAS/RKAM telah dilakukan SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, maupun SMA Hasbunallah Tabalong. Dengan pelibatan para guru dan Komite Sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, komite sekolah, maupun kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Arie Wibowo, Bendahara II SMKN 1 Tanjung, Wawancara di ruang Bendahara tanggal 26 Mei 2014

¹⁷⁸ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, h.133

Manajemen yang tangguh dalam mewujudkan mutu sekolah sangat berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam memenej sekolah sangat dominan dalam mewujudkan mutu sekolah yang baik. Peranan kepala sekolah sangat menentukan sebab komponen-komponen: *man, money, and material* tidak akan dapat menjelma berwujud tujuan yang akan dicapai jika tidak dikelola oleh seorang pemimpin sekolah yang tangguh.¹⁷⁹

Pelaksanaan suatu perencanaan tidak akan berhasil dan efektif tanpa didukung dengan prosedural kerja yang sistematis dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Efektivitas yang diinginkan bukanlah efektivitas pribadi, melainkan efektivitas organisasi. Efektivitas tersebut dapat dilaksanakan dengan peran pengelola pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan

Penelitian ini juga menemukan terdapat perbedaan dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Tim penyusun RKAS di SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung menyediakan form isian yang berikan kepada para guru, wakasek, dan pengelola sekolah lainnya untuk mendapatkan data dan informasi mengenai rencana program kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dikaji dan pada akhirnya disusun sebagai

¹⁷⁹ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.66

bahan masukan dalam penyusunan RKAS. Sehingga tim penyusun tidak hanya mengandalkan masukan secara lisan dari para guru, akan tetapi ada dokumentasi tertulis yang rinci dan memudahkan tim untuk menelaahnya lebih lanjut. Hal ini tidak dilakukan oleh MAN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah. Peneliti beranggapan fenomena tersebut terjadi karena mengingat SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung merupakan sekolah yang melakukan manajemen berbasis standar ISO, sehingga mereka berupaya melakukan pengelolaan dengan sebaik dan seefektif mungkin.

Dedi Supriadi berpendapat bahwa perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi menuntut perubahan pula dalam sistem alokasi pembiayaan pendidikan, antara lain dengan menerapkan formula pembiayaan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan riil sekolah (*needs-based funding formula*). Formula dimaksud diperlukan untuk menjawab pertanyaan seperti berapakah jumlah dana yang perlu dialokasikan untuk sekolah-sekolah dan faktor-faktor apakah yang harus diperhitungkan dalam menentukan alokasi dana untuk sekolah tertentu? Jawaban yang jelas terhadap kedua pertanyaan tersebut akan mampu mencegah, atau paling tidak mengurangi, terjadinya bias atau penyimpangan lainnya dalam menentukan alokasi dana karena alasan politik atau kepentingan lainnya.¹⁸⁰

Untuk menentukan biaya, diperlukan data yang akurat. Akurasi kebutuhan biaya harus didukung informasi melalui data yang diperlukan, dengan demikian

¹⁸⁰Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.16

keputusan yang diambil menjadikan sekolah memperoleh biaya sesuai kebutuhannya.¹⁸¹

Manajer atau pengelola pendidikan harus mendistribusikan sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasional. Karena keterbatasan sumber daya, maka para manajer harus mengandalkan data biaya dalam memutuskan tindakan apa yang akan memberikan hasil optimal. Tujuan utama data tersebut untuk mengkomunikasikan dengan baik informasi keuangan maupun non keuangan kepada manajemen untuk memudahkan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya.¹⁸²

Rencana biaya adalah rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan. Langkah yang harus dilakukan dalam menyusun penganggaran adalah dengan membuat rencana biaya, kemudian menyelaraskan rencana biaya tersebut dengan sumber pendanaan sekolah/madrasah.¹⁸³

Hal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak hanya berdasarkan rencana biaya yang telah disusun oleh pengelola pendidikan namun juga harus memperhatikan estimasi ketersediaan sumber pendanaan, mengingat keterbatasan anggaran dana yang diperoleh sekolah/madrasah dari pemerintah maupun masyarakat.

Ketepatan dalam menghitung biaya akan membantu ketepatan dalam

¹⁸¹ Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.213

¹⁸²Letricia Gayle Rayburn, *Cost Accounting: Using a Cost Management Approach*, terj Sugyanto (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 4

¹⁸³Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, *Peningkatan Manajemen melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kemendiknas-Kemenag, 2011), h.139

pengambilan keputusan, sehingga kebijakan perusahaan atau suatu organisasi akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan. Dengan menghitung biaya secara tepat dapat memberikan informasi yang benar. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan tepat pula.¹⁸⁴

Proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin berlangsung dengan tahapan yaitu menghimpun data, melakukan analisis data, menetapkan keputusan yang ditempuh, mengoperasionalkan keputusan menjadi kegiatan atau tindakan, dan selama berlangsungnya kegiatan sebagai pelaksanaan keputusan akan diperoleh data operasional baru.¹⁸⁵

Penyusunan anggaran secara inkremental (*incremental budgeting*) berangkat dari asumsi bahwa anggaran tahun yang lalu juga dapat menjadi basis penyusunan anggaran tahun sekarang atau tahun-tahun berikutnya.¹⁸⁶ Data biaya masa yang lalu juga sangat penting dan diperlukan sebagai taksiran biaya masa datang serta pengetahuan dan pengalaman manajemen dalam menilai tingkat keberhasilan kepemimpinannya dalam melaksanakan program ataupun kegiatan-kegiatan. Dengan demikian, biaya masa datang dapat dikendalikan baik kuantitas maupun kualitas.¹⁸⁷

Pengelola pendidikan dapat mengajukan pertanyaan yang sangat penting

¹⁸⁴Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.132

¹⁸⁵ Veitzhal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.32

¹⁸⁶ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, h.148

¹⁸⁷Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.134

seperti apa yang salah di masa lalu atau apa yang dapat kami lakukan sekarang? Oleh karena itu, biaya masa mendatang tentunya harus relevan dengan kebijakan sekolah dan sangat dipengaruhi oleh keputusan--keputusan para pengelola pendidikan.

Penganggaran didasarkan atas kinerja masa lalu dan dibentuk oleh pertimbangan rasional mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di masa mendatang.¹⁸⁸ Dengan demikian para pengelola atau manajer menggunakan anggaran untuk perencanaan dan penetapan tujuan di masa mendatang. Anggaran juga membantu manajer mengevaluasi kinerja masa lalu.

Kualitas pendidikan tidak terjadi secara alamiah, ia terbentuk bila dikelola dengan manajemen yang baik. Direncanakan, digali sumber dayanya, dibiayai, diciptakan iklim organisasinya, diseleksi sumber daya manusianya, diawasi pelaksanaan kegiatannya, dikelola secara profesional, dan dipimpin secara efektif dan efisien, sehingga terbentuklah budaya kerja yang bertanggungjawab, penuh dedikasi, dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan.

Kepala sekolah merupakan manajer puncak dari sekolah yang memimpin proses perencanaan, menyusun standar-standar dan prosedur layanan manajemen, memimpin pelaksanaan aktivitas manajemen dan mengevaluasi hasilnya.¹⁸⁹

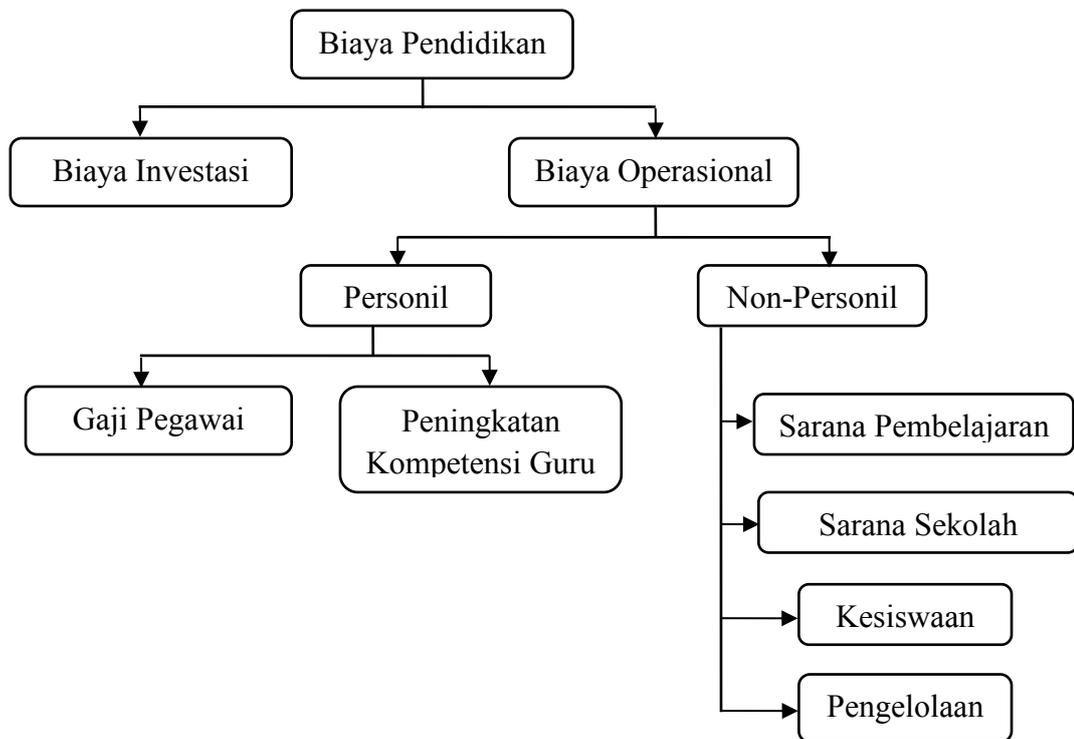
Lembaga pendidikan memerlukan dana yang akan dipergunakan dalam membiayai berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu sekolah harus mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembiayaan.

¹⁸⁸Letricia Gayle Rayburn, *Cost Accounting: Using a Cost Management Approach*, terj Sugyanto (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 4

¹⁸⁹Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.550

3. Alokasi Anggaran Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dan data dari RKAS/RKAM tahun 2013, peneliti mengklasifikasikan alokasi anggaran sekolah ke dalam enam aspek yang meliputi: gaji pegawai, peningkatan kompetensi guru, sarana pembelajaran, sarana sekolah, kesiswaan, dan pengelolaan. Hal itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nanang Fattah (1998),¹⁹⁰ kemudian peneliti sesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini dan fokus penelitian yang diteliti.



Gambar 5.1 Klasifikasi Biaya Pendidikan

Rekapitulasi alokasi anggaran di SMAN 1 Tanjung berdasarkan klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.1 ALOKASI ANGGARAN SMAN 1 TANJUNG TAHUN 2013

¹⁹⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.116

No.	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Gaji Pegawai	2.139.168.800	72,14%
2.	Pengelolaan	352.150.000	11,88%
3.	Sarana Sekolah	198.086.000	6,68%
4.	Sarana Pembelajaran	168.910.000	5,70%
5.	Kesiswaan	96.664.000	3,26%
6.	Peningkatan Kompetensi Guru	10.350.000	0,35%
	Jumlah	2.965.328.800	100%

Sumber: RKAS SMAN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar di SMAN 1 Tanjung digunakan untuk memenuhi gaji pegawai yaitu sebesar 72,14% sedangkan alokasi anggaran terkecil digunakan untuk peningkatan kompetensi guru yaitu sebesar 0,35%. Alokasi anggaran untuk sarana sekolah sebesar 6,68% yang berarti lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran yang hanya sebesar 5,70%. Sekolah juga menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan kesiswaan sebesar 3,26% dan untuk pengelolaan sebesar 11,88%.

Rekapitulasi alokasi anggaran di MAN 1 Tanjung berdasarkan klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.2 ALOKASI ANGGARAN MAN 1 TANJUNG TAHUN 2013

No.	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Gaji Pegawai	998.234.400	75,03%
2.	Pengelolaan	107.370.000	8,07%

3.	Sarana Madrasah	86.610.000	6,51%
4.	Sarana Pembelajaran	61.901.000	4,65%
5.	Kesiswaan	55.340.000	4,16%
6.	Peningkatan Kompetensi Guru	21.000.000	1,58%
	Jumlah	1.330.455.400	100%

Sumber: RKAM MAN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar di MAN 1 Tanjung digunakan untuk memenuhi gaji pegawai yaitu sebesar 75,03% sedangkan alokasi anggaran terkecil digunakan untuk peningkatan kompetensi guru yaitu sebesar 1,58%. Alokasi anggaran untuk sarana madrasah sebesar 6,51% yang berarti lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran yang hanya 4,65%. Sekolah menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan kesiswaan sebesar 4,16% dan untuk pengelolaan sebesar 8,07%.

Rekapitulasi alokasi anggaran di SMKN 1 Tanjung berdasarkan klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.3 ALOKASI ANGGARAN SMKN 1 TANJUNG TAHUN 2013

No.	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Gaji Pegawai	2.956.351.200	53,92%
2.	Sarana Pembelajaran	979.808.250	17,87%
3.	Sarana Sekolah	896.541.332	16,35%
4.	Pengelolaan	352.884.250	6,44%
5.	Kesiswaan	247.101.000	4,51%
6.	Peningkatan Kompetensi Guru	50.000.000	0,91%
	Jumlah	5.482.686.032	100%

Sumber: RKAS SMKN 1 Tanjung tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar di SMKN 1 Tanjung digunakan untuk memenuhi gaji pegawai yaitu sebesar 53,92% sedangkan alokasi anggaran terkecil digunakan untuk peningkatan kompetensi guru yaitu sebesar 0,91%. Alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran sebesar 17,87% yang berarti lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk sarana sekolah yang hanya sebesar 16,35%. Sekolah juga menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan kesiswaan sebesar 4,51% dan untuk pengelolaan sebesar 6,44%.

Rekapitulasi alokasi anggaran di SMA Hasbunallah Tabalong berdasarkan klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.4 ALOKASI ANGGARAN SMA HASBUNALLAH TABALONG TAHUN 2013

No.	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Gaji Pegawai	269.842.625	63,94%
2.	Sarana Pembelajaran	55.090.800	13,05%
3.	Pengelolaan	46.239.350	10,96%
4.	Kesiswaan	23.160.000	5,49%
5.	Sarana Sekolah	22.867.000	5,42%
6.	Peningkatan Kompetensi Guru	4.800.000	1,14%
	Jumlah	421.999.775	100%

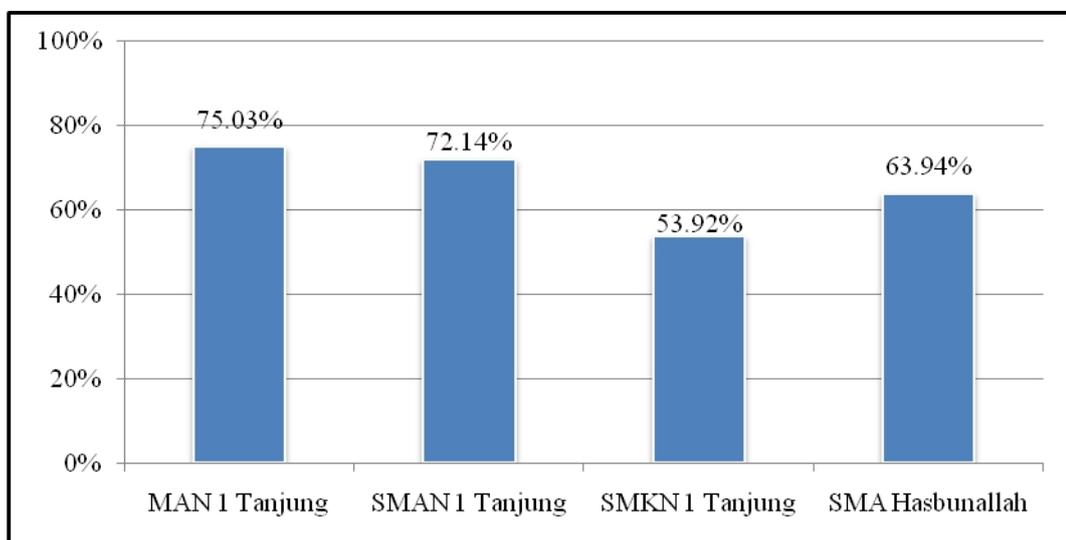
Sumber: RKAS SMA Hasbunallah Tabalong tahun 2013, data diolah

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar di SMA Hasbunallah Tabalong digunakan untuk memenuhi gaji pegawai yaitu sebesar 63,94% sedangkan alokasi anggaran terkecil digunakan untuk peningkatan kompetensi guru yaitu sebesar 1,14%. Alokasi anggaran untuk sarana

pembelajaran sebesar 13,05% yang berarti lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk sarana sekolah yang hanya sebesar 5,42%. Sekolah juga menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan kesiswaan sebesar 5,49% dan untuk pengelolaan sebesar 10,96%

Mutu pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam pengalokasian sumber-sumber yang secara langsung berhubungan dengan elemen-elemen mutu atau keunggulan (*exelency*) sasaran yang harus diberi biaya prioritas dalam pendidikan.¹⁹¹

Berdasarkan data penelitian, setiap sekolah telah mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk memenuhi gaji pegawai, sebagaimana disajikan pada diagram berikut:



Gambar 5.2 Alokasi Anggaran Gaji Pegawai Tahun 2013

¹⁹¹ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.71

MAN 1 Tanjung mengalokasikan anggaran gaji pegawai terbesar yaitu sebanyak 75,03% dari seluruh total anggaran sekolah, disusul SMAN 1 Tanjung sebanyak 72,14%, dan SMA Hasbunallah Tabalong sebanyak 63,94%, sedangkan SMKN 1 Tanjung mengalokasikan anggaran gaji pegawai terkecil yaitu sebanyak 53,92% dari seluruh total anggaran sekolahnya.

Hal demikian selaras dengan hasil survey Asian Model yang menunjukkan bahwa proporsi gaji guru merupakan proporsi terbesar dalam keseluruhan biaya operasional pendidikan, berkisar antara 80%-85%, tergantung jenis pendidikannya.¹⁹² Selain itu, menurut Moch. Idochi Anwar mengemukakan bahwa dari jumlah biaya langsung untuk pengajaran dan biaya langsung penunjang untuk pengajaran, kebanyakan 70% atau 65% digunakan untuk gaji guru. Hal ini mengingat bahwa dalam proses belajar mengajar, nilai pengorbanan guru menempati urutan yang teratas ketimbang unsur lain.¹⁹³

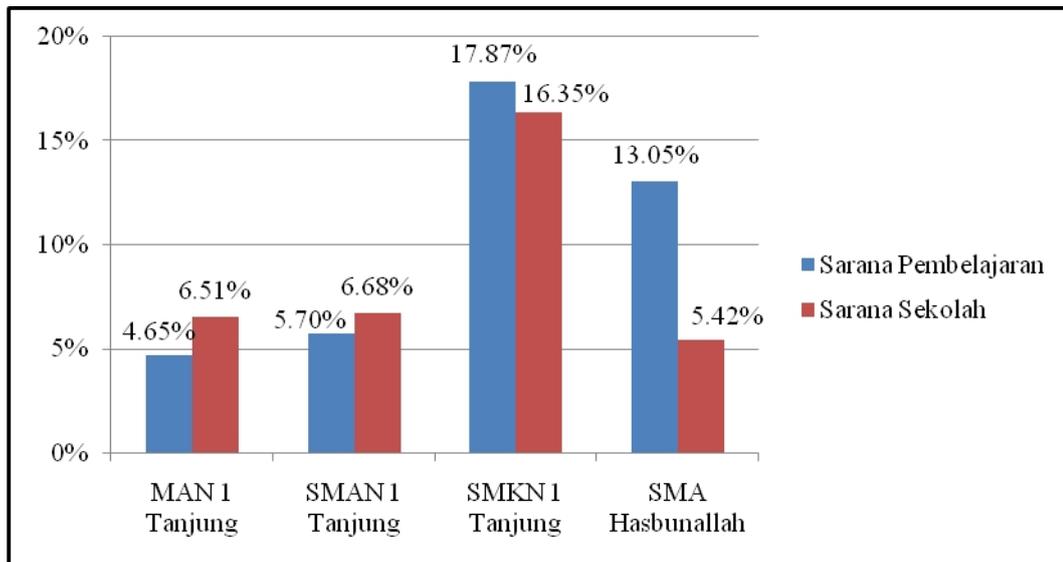
Rata-rata gaji guru secara khusus didasarkan pada pengalaman dan kesiapan pendidikannya. Asumsinya bahwa gaji guru dapat dijadikan unsur untuk *input* guru dan dijadikan sebagai ukuran produktivitas kerjanya.¹⁹⁴ Jika sekolah telah berhasil merekrut guru-guru yang produktif maka produktivitas kerja guru akan mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas siswa.

Alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran dan sarana sekolah disajikan pada diagram berikut:

¹⁹²Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.70

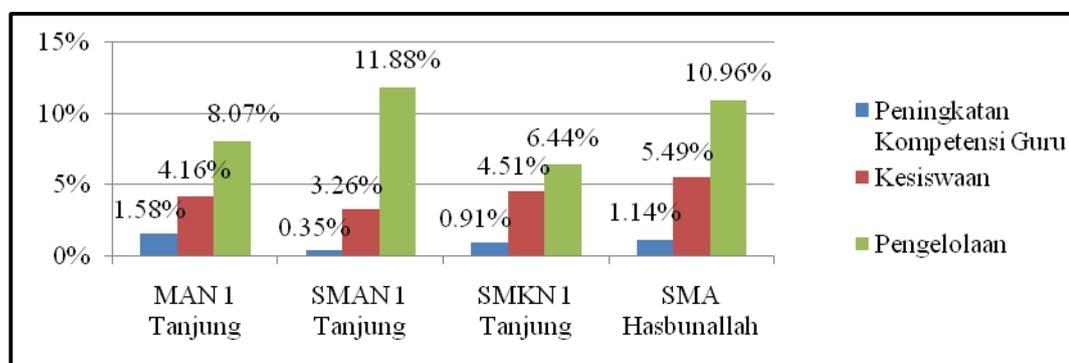
¹⁹³ Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.152

¹⁹⁴ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, hal.34



Gambar 5.3 Alokasi Anggaran Sarana Pembelajaran dan Sarana Sekolah Tahun 2013

Berdasarkan gambar 5.3 di atas, MAN 1 Tanjung dan SMAN 1 Tanjung mengalokasikan anggaran untuk sarana pembelajaran lebih kecil dibanding alokasi anggaran untuk sarana sekolah. Sebaliknya, SMKN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah Tabalong mengalokasikan anggaran untuk sarana pembelajaran lebih besar dibanding alokasi anggaran untuk sarana sekolah. Adapun alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, kegiatan kesiswaan, dan pengelolaan disajikan pada diagram berikut:



Gambar 5.4 Alokasi Anggaran Kompetensi Guru, Kesiswaan, dan Pengelolaan Tahun 2013

Data penelitian menunjukkan bahwa anggaran peningkatan kompetensi guru mendapatkan porsi paling kecil diantara seluruh alokasi anggaran lainnya, hal ini terjadi pada ke empat sekolah yang diteliti.

Peningkatan kemampuan mengajar melalui berbagai latihan, penataran, serta pendidikan kembali pada program yang relevan dan lebih tinggi perlu mendapat perhatian yang terencana dan periodik, supaya akses kepada pencapaian peningkatan mutu pendidikan baik internal maupun eksternal, sejalan dengan peningkatan kemampuannya. Biayanya harus dianggarkan secara tepat dan cukup, baik dilihat dari kebutuhan pendidikannya maupun jenis pendidikan dan latihan yang diikutinya.¹⁹⁵

Dengan demikian permasalahan pengelolaan pembiayaan pendidikan semestinya juga menjadi perhatian utama para pengelola pendidikan. Mereka memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan mereka harus mengalokasikan sumber daya tersebut sehingga memaksimalkan produktivitas organisasi.

Hal penting yang juga harus diperhatikan oleh pengelola pendidikan adalah proses penganggaran bukanlah praktek rutin yang selalu sama setiap tahunnya, akan tetapi harus berbasis pada penilaian kebutuhan sekolah dan tujuan jangka panjang, walaupun tetap dapat menggunakan anggaran terdahulu sebagai bahan pertimbangan.

Pengelola pendidikan harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi sekolah dan memiliki perencanaan yang matang, serta

¹⁹⁵ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.71

senantiasa melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

4. Biaya Satuan Pendidikan

Untuk menentukan biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis *unit cost*. Biaya satuan per siswa per tahun (*unit cost per year*) adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total biaya pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam setahun.¹⁹⁶ Sedangkan biaya satuan per siswa per jam pelajaran (*unit cost per hour*) adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari *unit cost per year* dibagi total jam pelajaran yang ada di sekolah selama setahun.¹⁹⁷ Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Unit Cost (per student per year)} = \frac{\sum \text{biaya pengeluaran sekolah}}{\sum \text{siswa}}$$

$$\text{Unit Cost (per student per hour)} = \frac{\text{unit cost (per student per year)}}{\sum \text{jam pelajaran}}$$

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pada tahun 2013 SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, dan SMKN 1 Tanjung memiliki 1.824 jam pelajaran, sedangkan SMA Hasbunallah 1.862 jam pelajaran. Biaya satuan per siswa (*unit*

¹⁹⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.25

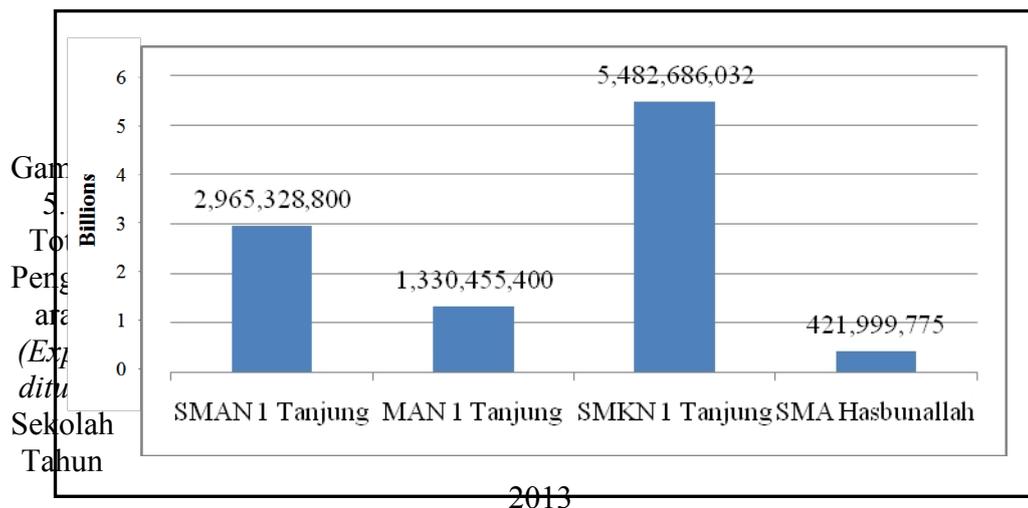
¹⁹⁷ J. Alan Thomas, *The Productive School*, h.47

cost) per jam pelajaran adalah *unit cost* tahun 2013 dibagi jumlah total jam pelajaran efektif pada tahun tersebut. Adapun perbandingan *unit cost* setiap sekolah disajikan pada tabel berikut:

TABEL 5.5 PERBANDINGAN BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2013

Nama Sekolah	Expenditure	Jumlah Siswa	Unit Cost/Tahun	Unit Cost/Jam Pelajaran
SMAN 1 Tanjung	Rp 2.965.328.800	665	Rp 4.459.141	Rp 2.445
MAN 1 Tanjung	Rp 1.330.455.400	183	Rp 7.270.248	Rp 3.986
SMKN 1 Tanjung	Rp 5.482.686.032	1.563	Rp 3.507.797	Rp 1.923
SMA Hasbunallah	Rp 421.999.775	85	Rp 4.964.703	Rp 2.666

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 total pengeluaran (*expenditure*) terbesar adalah SMKN 1 Tanjung yaitu sebesar Rp5.482.686.032,00 disusul SMAN 1 Tanjung sebesar Rp2.965.328.800,00 kemudian MAN 1 Tanjung sebesar Rp1.330.455.400,00 sedangkan total pengeluaran (*expenditure*) terkecil adalah SMA Hasbunallah Tabalong sebesar Rp421.999.775,00



Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya perbedaan total pengeluaran tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam alokasi dana bantuan operasional

yang diberikan pemerintah Kabupaten Tabalong. Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) diberikan pada SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Adapun dana BOMM yang diberikan kepada sekolah swasta, MA, dan Pondok Pesantren dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).¹⁹⁸

Berdasarkan data penelitian menunjukkan SMAN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah Tabalong mendapatkan dana BOMM Kabupaten Tabalong sebesar Rp85.000,00/siswa/bulan atau sebesar Rp1.020.000,00/siswa/tahun, sedangkan SMKN 1 Tanjung memperoleh Rp90.000,00/siswa/bulan atau sebesar Rp1.080.000,00/siswa/tahun. Adapun MAN 1 Tanjung hanya memperoleh Rp75.000,00/siswa/bulan atau sebesar Rp900.000,00/siswa/tahun.

Dana BOMM per siswa untuk tingkat SMK paling besar mengingat jenis pengeluaran sekolah yang lebih banyak termasuk untuk kerja praktik dan magang siswa serta keperluan pendidikan kejuruan lainnya, namun mengherankan adanya perbedaan besaran bantuan dana operasional antara tingkat SMA dan MA. Fenomena demikian tentu tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003.

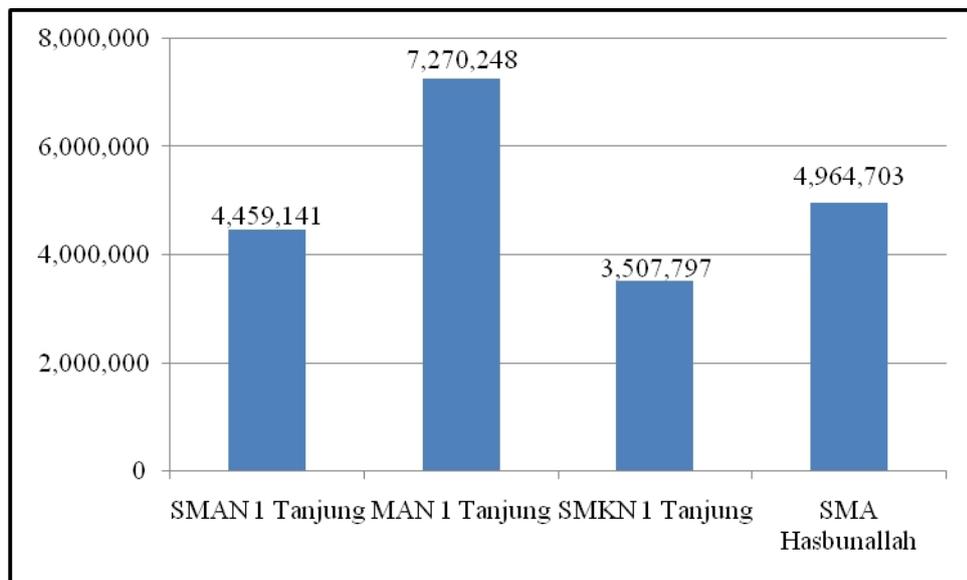
Hal itu disebabkan kebijakan dualisme struktural penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nasional, yakni pendidikan sekolah berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan pendidikan madrasah

¹⁹⁸Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong Pasal 2

berada dalam naungan Kementerian Agama. Dualisme struktural yang terus berlangsung ini pada faktanya telah melahirkan perlakuan dikotomis dan tidak adil oleh pemerintah.

Walaupun demikian, pada faktanya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa MAN 1 Tanjung tetap memperoleh dana yang cukup besar melalui anggaran dana DIPA dari Kementerian Agama. Dana DIPA yang diperoleh tersebut meliputi gaji PNS, dana BOS Pusat, maupun komponen operasional lainnya selain alokasi anggaran dana BOS.

Selain total pengeluaran sekolah (*expenditure*), hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 MAN 1 Tanjung memiliki *unit cost* terbesar, selama setahun siswa di sekolah memerlukan biaya sebesar Rp7.270.248,00. Sedangkan *unit cost* SMA Hasbunallah Tabalong sebesar Rp4.964.703,00/siswa/tahun, kemudian *unit cost* SMAN 1 Tanjung sebesar Rp4.459.141,00/siswa/tahun, dan *unit cost* terkecil adalah SMKN 1 Tanjung sebesar Rp3.507.797,00/siswa/tahun yang disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 5.6 Biaya Satuan per Siswa (*Unit Cost*) Tahun 2013

Berdasarkan data penelitian, total pengeluaran (*expenditure*) SMKN 1 Tanjung terbesar namun memiliki *unit cost* terkecil. Hal itu berarti SMKN 1 Tanjung mampu membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan menggunakan dana secara efektif dan efisien. Sekolah juga mampu menerapkan manajemen berbasis ISO selama lebih dari 7 tahun serta memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi seluruh warga sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa juga tergolong cukup baik, hal ini berdasarkan data penelitian yang menunjukkan bahwa SMKN 1 Tanjung melakukan pertemuan dengan orang tua siswa secara rutin minimal empat kali dalam setahun, dan jika terdapat keperluan mendesak atau insidental lainnya, sekolah juga mengkomunikasikan dan melibatkan peran orang tua siswa.

Data penelitian tersebut menunjukkan bahwa MAN 1 Tanjung memiliki *unit cost* terbesar, padahal hasil observasi penelitian juga menunjukkan bahwa

keadaan fisik dan fasilitas MAN 1 Tanjung masih relatif sederhana. Berbeda dengan SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung yang memiliki beberapa bangunan baru dan fasilitas proyektor LCD di setiap ruang kelas, MAN 1 Tanjung bahkan hanya memiliki 1 buah proyektor LCD yang harus digunakan bergantian antara guru.

MAN 1 Tanjung yang usianya tergolong cukup tua berdiri sejak tahun 1968 belum mampu menyediakan fasilitas belajar yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal. Wakamad Kesiswaan MAN 1 Tanjung mengutarakan mengenai kekurangan alat peraga praktik pengajaran dan terbatasnya fasilitas sekolah untuk proses pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan, sehingga menyebabkan program yang sudah direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Stanley J. Spanbauer menjelaskan ada tujuh unsur dalam menegakkan mutu pendidikan yang harus dibiayai, yaitu *human resources, curriculum and instruction, goal setting (standard of excellence for design and implementation of operation), technology, marketing, customer service, management*.¹⁹⁹

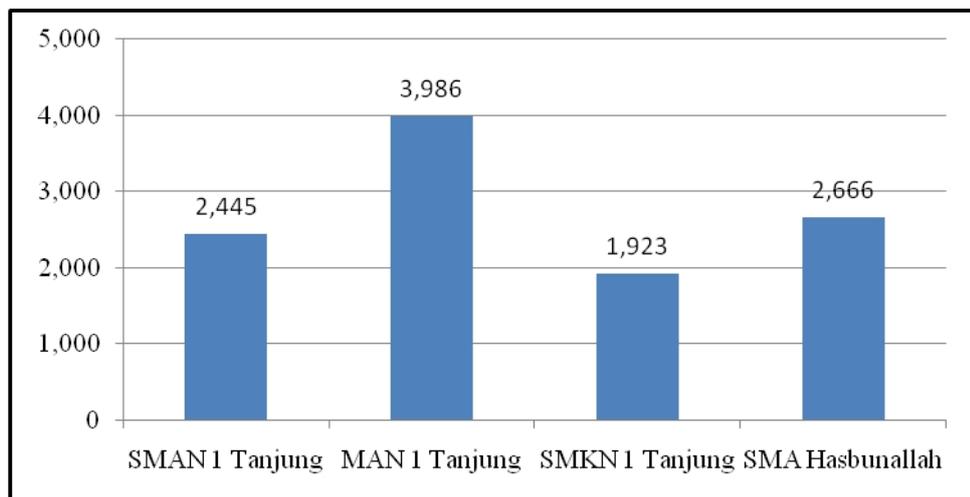
Faith E. Crampton menjelaskan bahwa gaji pengajar, pengeluaran yang mendukung pengajaran, dan pengeluaran untuk sarana prasarana memiliki dampak positif pada prestasi siswa, meskipun besarnya dampak masing-masing bervariasi.²⁰⁰ Sekolah yang kompeten umumnya didukung oleh sumber daya

¹⁹⁹ Stanley J Spanbauer, *A Quality System for Education*, (Milwaukee: ASQS Press, 1992); dikutip oleh Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.70

²⁰⁰ Faith E. Crampton, "Spending on School Infrastructure: does Money Matter?" *Journal of Educational Administration* Vol.47 No.3, (Milwaukee-Wisconsin: Emerald Group Publishing Limited, 2009), h.317

pembelajaran dan instrumen teknologi yang memadai. Sumber daya pembelajaran dimaksud mencakup juga media pembelajaran.²⁰¹ Dengan demikian alokasi pembiayaan untuk sarana prasarana maupun fasilitas sekolah lainnya juga merupakan hal yang penting, sebab teknologi pembelajaran dan fasilitas pendukung belajar lainnya memiliki peran bagi proses pembelajaran siswa dalam rangka peningkatan kualitas sekolah dan layanan pendidikan.

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan walaupun total pengeluaran terbesar digunakan oleh SMKN 1 Tanjung namun sekolah ini memiliki biaya yang paling efisien, yakni biaya per jam pelajaran siswa di sekolah hanya sebesar Rp1.923,00 disusul SMAN 1 Tanjung sebesar Rp2.445,00/siswa/jam pelajaran, kemudian SMA Hasbunallah Tabalong sebesar Rp2.666,00/siswa/jam pelajaran, dan biaya terbesar MAN 1 Tanjung sebesar Rp3.986,00/siswa/jam pelajaran yang disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 5.7 Biaya Satuan per Jam Pelajaran (*Unit Cost*) Tahun 2013

²⁰¹ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, h.76

SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, dan SMKN 1 Tanjung merupakan sekolah negeri yang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa. Sedangkan SMA Hasbunallah Tabalong masih membebaskan biaya Rp300.000,00/bulan kepada setiap siswa, meskipun sekolah ini juga menerima dana bantuan operasional dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Tabalong. Namun *unit cost* SMA Hasbunallah masih lebih efisien dibandingkan MAN 1 Tanjung.

Perbedaan biaya merupakan hasil dari berbagai faktor, melibatkan kualitas pelayanan yang disediakan dan harga yang dibayarkan bagi *input*. Hal tersebut juga merupakan hasil dari perbedaan antar output yang disediakan oleh sistem pendidikan.²⁰²

Fakta menunjukkan bahwa peningkatan belanja (*expenditure*) tidak berkorelasi dengan peningkatan hasil. Ini berarti bahwa peningkatan belanja (*expenditure*) tidak terkait dengan hasil yang lebih baik, dan hasil outcome dapat berbeda-beda antar daerah.²⁰³

Biaya pendidikan sebagai nilai yang dikeluarkan untuk suatu pengorbanan akan sangat menentukan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam pendidikan. Dengan jumlah biaya pendidikan tertentu dapat memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan pelayanan pendidikan yang baik.

Pendidikan yang baik akan meminta biaya yang lebih besar dari pendidikan yang jelek. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita menginginkan kualitas pendidikan yang tinggi, maka dituntut pemakaian biaya yang

²⁰² Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.91

²⁰³ World Bank, *Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2013), h.21

tinggi dan tepat penggunaannya. Kesimpulan pemikiran itu dapat berlaku dengan syarat bahwa penggunaan biaya itu secara tepat dan untuk itu biaya langsung lah yang memang dapat secara langsung meningkatkan pelayanan pendidikan.²⁰⁴

5. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Masalah efisiensi dan relevansi di dalam pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan konsep pembiayaan yang dilihat bukan hanya jumlah, tetapi juga dilihat dari segi kualitasnya, di mana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan untuk suatu tindakan yang dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Dengan kata lain, bagaimana pengupayaan pengelolaan suatu sistem pendidikan secara lebih ekonomis dengan pengorbanan yang diukur dengan uang (*cost*) yang kecil atau minimal, tetapi mendatangkan basil (*product*) yang tinggi atau maksimal.²⁰⁵

Untuk itu pengelola pendidikan harus dapat mengklasifikasikan unsur-unsur biaya pendidikan yang perlu mendapat prioritas pembiayaan yang secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengeluaran-pengeluaran pendidikan mana yang harus dapat dihindarkan. Dengan demikian, secara nyata dapat dihitung jumlah biaya untuk pendidikan yang sebenarnya yang berlangsung dalam suatu proses pendidikan.

Analisis *cost effectiveness* (efektivitas biaya) dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah telah

²⁰⁴Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.157

²⁰⁵Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, h.169

terlaksana secara efektif dan efisien. Analisis efektivitas biaya adalah sebuah analisis untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan biaya dan konsekuensinya dengan perhitungan biaya yang sistematis.

Dengan kata lain, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang dirancang untuk membantu dalam memilih antara program alternatif tindakan atau kebijakan ketika sumber daya terbatas. Sebagian besar keputusan pendidikan menghadapi kendala dalam ketersediaan sumber-sumber anggaran dan lainnya. Beberapa pendidikan lebih mahal daripada yang lain untuk hasil yang sama. Oleh karena itu pemilihan alternatif-alternatif yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu atau yang memiliki dampak terbesar per unit biaya adalah sangat penting. Dalam pendidikan, analisis efektivitas biaya digunakan dengan melihat hasil ujian sebagai ukuran keefektifan.²⁰⁶

Penelitian ini menggunakan analisis efektivitas biaya untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang telah dilaksanakan sekolah, ditunjukkan dalam tabel berikut:

TABEL 5.6 ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA

Sekolah	Unit Cost per siswa (A)	Nilai Akhir Ujian (B)	Cost Effectiveness (A) : (B)
SMAN 1 Tanjung	Rp4.459.141,00	42,54	Rp104.822,00 per point
MAN 1 Tanjung	Rp7.270.248,00	42,72	Rp170.184,00 per point
SMKN 1 Tanjung	Rp3.507.797,00	28,27	Rp124.082,00 per point
SMA Hasbunallah	Rp4.964.703,00	41,16	Rp120.620,00 per point

²⁰⁶Mark Bray, *Double-Shift Schooling: Design and Operation for Cost-Effectiveness* (Paris: UNESCO, 2008), h.31

Pada tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan pembiayaan yang paling efektif dilakukan oleh SMAN 1 Tanjung. Sekolah ini membutuhkan Rp104.822,00 untuk setiap point nilai yang diperoleh siswa. Itu berarti, biaya satuan per siswa (*unit cost*) yang rendah belum tentu tidak efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. SMKN 1 Tanjung merupakan sekolah dengan *unit cost* termurah tetapi membutuhkan Rp124.082,00 per point, biaya yang masih lebih besar dibandingkan SMA Hasbunallah Tabalong yang hanya membutuhkan Rp120.620,00 per point. Namun MAN 1 Tanjung merupakan sekolah dengan *unit cost* paling mahal dan efektivitas biaya paling rendah karena membutuhkan Rp170.184,00 per point.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan per siswa (*unit cost*) yang rendah belum tentu tidak efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya, *unit cost* termahal juga belum tentu paling efektif dalam meningkatkan nilai siswa.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas baik, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien.²⁰⁷ Dengan demikian berdasarkan analisis *cost effectiveness* di atas SMAN 1 Tanjung merupakan sekolah yang paling efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada tahun 2013.

Dari sisi ekonomi, pendidikan sangat menguntungkan karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pendidikan (*benefits of education*) selain bernilai intrinsik juga bernilai ekstrinsik, keuntungannya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan (*individual*

²⁰⁷ Tim Penyusun, *Analisis Biaya*, h.1

benefits) maupun oleh masyarakatnya (*social benefits*) sebab berkontribusi luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.²⁰⁸ Keuntungan dan balikan investasi pendidikan terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu sendiri menghasilkan tenaga berkualitas, sedangkan kualitas tenaga kerja memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.²⁰⁹

Ketersediaan dana pendidikan sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi masalah. Sumber dana untuk membiayai pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD besarnya tergantung pada kemampuan negara dan komitmennya terhadap pendidikan. Tuntutan masyarakat bukan hanya sekedar terpenuhinya kewajiban belajar, melainkan menuntut pendidikan yang murah dan berkualitas.²¹⁰

Oleh karena itu keterbatasan anggaran yang membatasi ruang gerak pengembangan sumber daya manusia sebagai *human investment* menyebabkan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus diprioritaskan kepada program pendidikan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan dan kualitas pendidikan, serta manfaat pendidikan (*individual benefits* maupun *social benefits*).

Dengan demikian pengelolaan pembiayaan pendidikan bukan saja menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut alokasi dan penganggaran dana secara efisien sehingga semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan harus memberikan hasil terbaik tetapi biaya yang dikeluarkannya harus seirit mungkin.

²⁰⁸ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.16

²⁰⁹ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, h.206

²¹⁰ Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h.6

B. Penggunaan Pembiayaan pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Penelitian ini menemukan bahwa keempat sekolah yang diteliti, penggunaan dan penyaluran anggaran dilakukan secara strategis dan integratif antara stakeholder, membangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan sekolah ditujukan untuk membiayai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Setiap dana yang masuk ke sekolah digunakan untuk keperluan sekolah yang berbeda-beda oleh penanggungjawab setiap kegiatan melalui persetujuan kepala sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat sekolah memperoleh sumber pembiayaan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dari Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Menengah dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank penyalur. Selanjutnya Bank penyalur menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah. Sedangkan

penyaluran dana BOMM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong juga disalurkan secara langsung ke rekening sekolah.

Penelitian terbaru mengenai program BOS menunjukkan bahwa program ini telah memiliki dampak positif dan berhasil di sejumlah daerah. Transfer dana langsung ke rekening sekolah mengurangi kemungkinan kebocoran, karena hampir semua sekolah menerima dana full (meskipun kadang-kadang terjadi keterlambatan).²¹¹

Dana yang telah diperoleh sekolah selanjutnya digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan program kegiatan melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengeluaran dana di sekolah/madrasah harus melalui beberapa tahap. Penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mengajukan lembar permintaan tersebut langsung kepada kepala sekolah/kepala madrasah untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana. Selanjutnya kepala sekolah/kepala madrasah akan melakukan pemeriksaan apakah pengajuan tersebut sesuai dengan RKAS/RKAM, setelah itu kepala sekolah/kepala madrasah dapat menyetujuinya atau menolaknya. Setelah penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana mendapat persetujuan kepala sekolah/kepala madrasah, selanjutnya mengajukannya kepada bendahara untuk mendapatkan pencairan dana, kemudian baru bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sekolah/madrasah.

²¹¹ World Bank, *Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities: Indonesia Public Expenditure Review*, (Washington DC: The World Bank, 2007), h.36

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilaksanakan dengan baik adalah adanya anggaran yang mencukupi, tersedia dan siap dipergunakan ketika diperlukan sekolah.²¹²

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah.²¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat sekolah memiliki dua orang bendahara yang masing-masing mengelola dana BOS Pusat dan dana BOMM Kabupaten Tabalong. Bendahara I SMAN 1 Tanjung merupakan guru matematika sekaligus menjabat sebagai wakasek sarana prasarana, sedangkan Bendahara II SMAN 1 Tanjung merupakan guru bahasa Inggris. Sedangkan Bendahara I MAN 1 Tanjung merupakan staf TU dan Bendahara II MAN 1 Tanjung merupakan guru matematika. Adapun Bendahara I dan Bendahara II SMKN 1 Tanjung masing-masing merupakan guru dan staf TU SMKN 1 Tanjung, yang keduanya berlatar belakang pendidikan jurusan akuntansi. Sedangkan Bendahara I dan Bendahara II SMA Hasbunallah keduanya merupakan kepala TU dan staf TU sekolah.

Salah seorang Bendahara SMAN 1 Tanjung sekaligus merupakan wakasek sarana prasarana, dengan pertimbangan kepala sekolah bahwa bendahara tersebut telah lama memahami dan mampu menjalankan tugasnya. Sedangkan salah

²¹² Wirawan, *Kepemimpinan*, h.543

²¹³ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h.177

seorang bendahara SMA Hasbunallah sekaligus merupakan kepala TU, dengan pertimbangan Kepala Sekolah bahwa minimnya SDM yang dimiliki, sedangkan bendahara tersebut pun telah lama memahami dan mampu menjalankan tugasnya.

Kemampuan seorang bendahara menjalankan tugas membantu kepala sekolah mengelola pembiayaan di sekolah memang merupakan hal yang penting. Namun pihak pengelola pendidikan terutama kepala sekolah yang memiliki kewenangan, juga harus mempertimbangkan agar jabatan rangkap bendahara sekolah tidak menghambat pelaksanaan tugas masing-masing. Selain itu, kepala sekolah juga harus melakukan regenerasi dan memberikan kepercayaan untuk melakukan pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada setiap orang yang dipimpinya (baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan).

Setiap sekolah telah memiliki pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pengelolaan dan penggunaan pembiayaan. Kepala sekolah/kepala madrasah juga mendelegasikan tugas kepada bendahara sekolah/madrasah untuk melakukan tugas pembukuan atau akunting pengurusan keuangan. Tugas Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, dan pengurusan yang menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.²¹⁴

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis

²¹⁴Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, h. 318

dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.²¹⁵

Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar. Tujuan sistem akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat dan disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Dengan demikian, pengelola sekolah yang disertai tanggung jawab melakukan tugas pembukuan atau akunting ini memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntansi, agar dapat menyajikan informasi yang tepat, yang akan digunakan oleh pimpinan maupun pihak lain untuk mengambil keputusan.

Hambatan yang biasa dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Tanjung dan MAN 1 Tanjung mengatasi kekurangan dan keterlambatan pencairan dana pembiayaan pendidikan menggunakan dana talangan dari Koperasi Sekolah. Adapun SMKN 1 Tanjung mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan dana talangan dari unit kerja produktif setiap program keahlian, maupun penyewaan aula sekolah untuk umum. Sedangkan SMA Hasbunallah menggunakan dana talangan hibah dari yayasan. Selain itu MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah, sama-sama menggunakan dana talangan bantuan dari individu

²¹⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 265

ataupun menggunakan dana dari alokasi pos anggaran lain yang belum mendesak, untuk mengatasi kekurangan dana di sekolah. Jika dengan berbagai cara tersebut sekolah/madrasah masih kekurangan dana, maka keempat sekolah menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa.

Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai suatu bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis.²¹⁶ Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan, jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah tersebut diupayakan agar mendekati angka yang sebenarnya. Namun pada pelaksanaan kegiatannya, jumlah yang direalisasikan bisa jadi tidak sama dengan anggarannya, hal demikian juga terjadi pada SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, maupun SMA Hasbunallah.

Fenomena demikian berarti sekolah belum mampu menjadikan anggaran sebagai alat pengendalian. Padahal dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).²¹⁷

Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain: adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran, terjadinya penghematan atau pemborosan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan, adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, dan penyusunan anggaran yang kurang tepat.

²¹⁶Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, h. 359

²¹⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 259

Sebuah organisasi produktif adalah organisasi yang memiliki keseimbangan antara *output* dan *input*. Hubungan matematis antara output dan input dapat ditunjukkan sebagai sebuah penyeimbangan yang disebut dengan fungsi produksi. Menurut pendapat J. Alan Thomas, konsep fungsi produksi harus ditambahkan pada literatur administrasi pendidikan. Konsep tersebut bertujuan untuk menekankan bahwa terdapat lebih dari satu cara untuk memproduksi pendidikan. Konsep fungsi produksi memberikan basis matematis untuk model pengambilan keputusan, prosedur tersebut memberikan konsep dasar praktik anggaran yang berguna ketika program penganggaran dijalankan.²¹⁸

Hambatan yang biasa dihadapi oleh sekolah/madrasah dalam pelaksanaan dan penggunaan pembiayaan adalah berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya dana yang diperoleh untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak. SMAN 1 Tanjung maupun MAN 1 Tanjung mengatasi kekurangan dana menggunakan dana talangan dari Koperasi sekolah. Adapun SMKN 1 Tanjung mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan dana talangan dari unit kerja produktif, maupun penyewaan aula sekolah untuk umum. Sedangkan SMA Hasbunallah Tabalong dapat menggunakan danaa talangan hibah dari yayasan, sebab tujuan awal adanya dana hibah yayasan ini sifatnya untuk membantu jika dana BOS dari pemerintah yang diterima sekolah masih kurang atau terlambat proses pencairannya, sedangkan sekolah tetap harus berkegiatan.

Selain itu MAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung dan SMA Hasbunallah, sama-sama menggunakan dana talangan bantuan dari individu ataupun

²¹⁸ J. Alan Thomas, *The Productive School*, h.12-15

menggunakan dana dari alokasi pos anggaran lain yang belum mendesak, untuk mengatasi kekurangan dana di sekolah.

Jika dengan berbagai cara tersebut sekolah/madrasah masih kekurangan dana, maka selanjutnya sekolah/madrasah berusaha menggali sumber pembiayaan dari orang tua siswa. Partisipasi dari orang tua siswa terhadap sekolah/madrasah merupakan salah satu ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang efektif.

Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, sekolah harus mengusahakannya dari sumber-sumber lain, terutama dari para siswa. Persoalan yang kemudian muncul bukan lagi semata-mata berapa jumlah idealnya, melainkan dari manakah dana yang diperlukan tersebut diperoleh sekolah.

Sebenarnya hanya ada dua andalan untuk pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah, yaitu pemerintah dan keluarga siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang bersangkutan.

Perlu dipahami bahwa orang tua siswa dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) dan kesediaannya untuk membayar (*willingness to pay*). Kedua dimensi ini tidak selalu sejalan. Ada orang tua yang kemampuan membayarnya tinggi dan ada juga yang rendah, begitu juga ada orang tua siswa yang kesediaan membayarnya tinggi dan rendah.²¹⁹

Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam kerangka kegiatan pendidikan dan pembelajaran hendaknya bukan ditafsirkan sebagai harga sebuah sekolah, melainkan harga dari mutu proses dan produk pendidikan atau pembelajaran yang dikehendaki.²²⁰

²¹⁹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.228

²²⁰ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, h.76

Beberapa studi menunjukkan bahwa kesediaan orang tua untuk membayar biaya pendidikan sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan mereka terhadap mutu pendidikan yang diperoleh anaknya di sekolah. Kepuasan yang tinggi terhadap pendidikan membuat orang tua lebih siap membayar daripada bila kepuasannya rendah.²²¹

Pandangan bahwa tidak perlu ada batasan mengenai jumlah maksimum-ideal satuan biaya pendidikan di tingkat sekolah didasari alasan bahwa jumlah maksimum-ideal tersebut bisa sangat beragam antar sekolah. Hal itu tergantung pada lokasi-nya, latar belakang status sosial-ekonomi para siswanya, kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan, dan kondisi pembiayaan pendidikan pada saat ini yang untuk sebagian sekolah telah melampaui jumlah rata-rata (yang tidak seharusnya diturunkan). Di samping itu, untuk menghasilkan mutu pendidikan yang paling tinggi yang mungkin dicapai (*the highest possible achievement*), tidak perlu ada batasan mengenai jumlah maksimum biaya yang dapat dibelanjakan oleh sekolah dan keluarga siswa.²²²

C. Pertanggungjawaban Pembiayaan pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

²²¹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.229

²²²Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, h.233

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah telah dilakukan pada keempat sekolah yang diteliti. Kepala sekolah/ kepala madrasah juga melakukan pengendalian agar pengeluaran keuangan sekolah selaras dengan anggaran anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Proses evaluasi ini dilakukan agar kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Di sinilah seorang kepala sekolah/kepala madrasah harus memantau dan menilai hasilnya.

Pengawasan merupakan suatu usaha yang bersifat terus menerus untuk mengetahui apakah aktivitas yang telah atau sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari kriteria-kriteria yang telah digariskan dalam rencana.

Melalui pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diproses melalui jalur hukum.

Fungsi dari evaluasi dan pengawasan adalah untuk melihat apakah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian target. Jika ada penyimpangan atau hambatan, bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian. Hasil evaluasi dan pengawasan perlu disampaikan pada pihak-pihak terkait agar penyesuaian yang diperlukan bisa segera dilakukan.

Evaluasi atau *evaluation involves auditing* merupakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *Auditing* merupakan proses pembuktian dan menentukan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, selanjutnya apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak berwenang.²²³

Dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.²²⁴

Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.²²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan SMAN 1 Tanjung, MAN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong dengan mengadakan pertemuan bersama komite sekolah dan orang tua siswa setiap enam bulan sekali, sedangkan SMKN 1 Tanjung mengadakan pertemuan bersama komite sekolah dan orang tua siswa setiap tiga bulan sekali.

²²³Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 267

²²⁴Hartani, *Manajemen Pendidikan*, h. 156

²²⁵ Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, h.357

Bendahara sekolah tidak hanya mencatat anggaran dan melakukan proses pembukuan setiap harinya, namun juga harus menyampaikan realisasinya dan membuat laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disampaikan bendahara kepada kepala sekolah/kepala madrasah. Selanjutnya sekolah/madrasah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong per triwulan maupun Direktorat Pendidikan Menengah Kemendiknas dan Kemenag per semester. Selain itu, SMKN 1 Tanjung tidak hanya dengan membuat laporan dan SPJ saja, namun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga datang untuk memeriksa langsung disetiap akhir program *Invest* yang dilaksanakan.

Untuk menunjukkan akuntabilitas, sekolah memang perlu membuat laporan berkala tentang penyelenggaraan serta penggunaan dana yang diperolehnya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada pihak pemberi anggaran baik itu pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan dari pihak pemberi dana.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai deskripsi dan analisis hasil penelitian, ada beberapa perbandingan yang diperoleh mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.7 MATRIKS PERBANDINGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Komponen Pengelolaan	Sekolah/Madrasah			
	SMAN 1 Tanjung	MAN 1 Tanjung	SMKN 1 Tanjung	SMA Hasbunallah
Waktu penyusunan RKAS/RKAM	Sejak bulan Januari tahun anggaran berlangsung	Sejak bulan Januari tahun anggaran berlangsung	Sejak bulan Desember tahun anggaran sebelumnya	Sejak bulan Januari tahun anggaran berlangsung
Tim penyusun RKAS/RKAM	Kepala sekolah bersama wakasek manajemen mutu serta bendahara dan wakasek lainnya, sepersetujuan komite sekolah	Kepala madrasah bersama wakamad, bendahara dan kepala TU, dengan persetujuan komite madrasah	Kepala sekolah bersama wakasek, bendahara dan kepala TU, dengan persetujuan komite sekolah	Kepala sekolah bersama wakasek dan kepala TU (bendahara), dengan persetujuan komite sekolah dan sepengetahuan yayasan.
Sumber pembiayaan operasional (tidak termasuk anggaran rutin belanja PNS)	1. BOS Pusat (35,44%) 2. BOMM Kabupaten Tabalong (64,56%)	1. DIPA (60,52%) 2. Hibah BOMM Kabupaten Tabalong (39,48%)	1. <i>Invest</i> dan BOS Pusat (46,42%) 2. BOMM Kabupaten Tabalong (53,58%)	1. BOS Pusat (9,79%) 2. Hibah BOMM Kabupaten Tabalong (22,12%) 3. Yayasan (68,10%)
Identifikasi kebutuhan anggaran	Penyediaan formulir kebutuhan tertulis, serta dikoordinasi dan dirapatkan secara langsung	Dikoordinasi dan dirapatkan secara langsung	Penyediaan formulir kebutuhan tertulis, serta Dikoordinasi dan dirapatkan secara langsung	Dikoordinasi dan dirapatkan secara langsung

Komponen Pengelolaan	Sekolah/Madrasah			
	SMAN 1 Tanjung	MAN 1 Tanjung	SMKN 1 Tanjung	SMA Hasbunallah
Iuran pendidikan siswa/SPP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rp300.000,00/ Bulan
Anggaran gaji pegawai	72,14%	75,03%	53,92%	63,94%
Anggaran Peningkatan Kompetensi Guru	0,35%	1,58%	0,91%	1,14%
Anggaran sarana pembelajaran	5,70%	4,65%	17,87%	13,05%
Anggaran sarana sekolah	6,68%	6,51%	16,35%	5,42%
Anggaran kegiatan kesiswaan	3,26%	4,16%	4,51%	5,49%
Anggaran pengelolaan sekolah	11,88%	8,07%	6,44%	10,96%
Total biaya (expenditure) tahun 2013	Rp 2.965.328.800	Rp 1.330.455.400	Rp 5.482.686.032	Rp 421.999.775
Unit cost per siswa tahun 2013	Rp 4.459.141	Rp 7.270.248	Rp 3.507.797	Rp 4.964.703
Unit cost per jam pelajaran tahun 2013	Rp 2.445	Rp 3.986	Rp 1.923	Rp 2.666
Cost effectiveness	Rp 104.822 per point	Rp 170.184 per point	Rp 124.082 per point	Rp 120.620 per point
Jabatan bendahara sekolah	1. Bendahara I (wakasek sarpras; guru matematika) 2. Bendahara II (guru bahasa Inggris)	1. Bendahara I (staf TU) 2. Bendahara II (guru matematika)	1. Bendahara I (guru akuntansi) 2. Bendahara II (staf TU, latar belakang akuntansi)	1. Bendahara I (Kepala TU) 2. Bendahara II (staf TU)

Komponen Pengelolaan	Sekolah/Madrasah			
	SMAN 1 Tanjung	MAN 1 Tanjung	SMKN 1 Tanjung	SMA Hasbunallah
Laporan pertanggung-jawaban	Bendahara ke kepala sekolah. Kemudian disampaikan ke Disdik Kabupaten Tabalong & Dirjen Pembinaan SMA tingkat Pusat	Bendahara ke kepala madrasah. Kemudian disampaikan ke Disdik Kabupaten Tabalong & Kemenag.	Bendahara ke kepala sekolah. Kemudian disampaikan ke Disdik Kabupaten Tabalong & Dirjen Pembinaan SMK tingkat Pusat	Bendahara ke kepala sekolah. Kemudian disampaikan ke Yayasan Hasbunallah, Disdik Kabupaten Tabalong & Dirjen Pembinaan SMA tingkat Pusat
Pertanggung-jawaban kepada orangtua siswa	Pertemuan komite sekolah setiap semester	Pertemuan komite sekolah setiap semester	Pertemuan komite sekolah setiap triwulan	Pertemuan komite sekolah setiap semester

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penganggaran pembiayaan pendidikan dari keempat sekolah yang diteliti dimulai dengan adanya penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/RKAM) yang dilakukan setiap tahun. Penganggaran pembiayaan dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKAS/RKAM yang bertugas mengidentifikasi rencana kegiatan dan kebutuhan dana berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari seluruh pihak sekolah. Kemudian tim penyusun membuat estimasi dana dan rancangan RKAS/RKAM berdasarkan format yang telah disediakan Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Hasil rancangan RKAS/RKAM tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah/madrasah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah/madrasah untuk mendapatkan saran dan persetujuan. RKAS/RKAM tersebut diajukan kepada Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Selain proses tersebut, SMA Hasbunallah Tabalong juga harus mengajukan RKAS tersebut kepada Yayasan Hasbunallah. Keempat sekolah mengalokasikan anggaran terbesar untuk memenuhi gaji pegawai dan alokasi anggaran terkecil untuk

peningkatan kompetensi guru, sedangkan alokasi anggaran untuk sarana pembelajaran, sarana sekolah, pengelolaan, dan kegiatan kesiswaan berbeda antara masing-masing sekolah. Berdasarkan analisis *cost effectiveness*, SMAN 1 Tanjung merupakan sekolah yang paling efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada tahun 2013 dibandingkan ketiga sekolah lainnya.

2. Dana yang diberikan pemerintah ataupun yayasan disalurkan langsung ke rekening sekolah/madrasah. Selanjutnya dana yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKAS/RKAM, melalui penyaluran anggaran kepada unit-unit kerja tertentu di sekolah/madrasah. Proses pencairan dana dilakukan melalui bendahara dengan persetujuan kepala sekolah/kepala madrasah.
3. Keempat sekolah yang diteliti mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Selain itu, MAN 1 Tanjung juga mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan kepada Kementerian Agama, sedangkan SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, dan SMA Hasbunallah Tabalong mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan kepada Direktorat Pendidikan Menengah Kemendiknas. SMA Hasbunallah Tabalong juga harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan kepada Yayasan Hasbunallah.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah/Madrasah
 - a. Bagi sekolah/madrasah sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, perlu kiranya untuk selalu melaksanakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien serta transparan. Sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan analisis *unit cost* dan *cost effectiveness* menunjukkan besaran yang berbeda di antara masing-masing sekolahmadrasah. Sekolah/madrasah hendaknya melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja agar mampu melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien.
 - b. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa (*unit cost*) dan efektivitas biaya (*cost effectiveness*), berguna untuk menilai dan memilih berbagai alternatif kebijakan ketika sumber daya terbatas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagian besar keputusan menghadapi kendala dalam ketersediaan sumber-sumber anggaran dan lainnya. Beberapa pendidikan lebih mahal daripada yang lain untuk hasil yang sama. Oleh karena itu pemilihan alternatif-alternatif yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu atau yang memiliki dampak terbesar per unit biaya adalah sangat penting. Analisis biaya tersebut dapat membantu pengelola pendidikan untuk mengenali masalah pendidikan dan

mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan pemanfaatan yang lebih jelas, pengelola pendidikan memiliki informasi tentang sumber pembiayaan yang tersedia dan bagaimana mengalokasikan sumber biaya tersebut, serta membantu pengelola pendidikan untuk menemukan dan menjelaskan pemborosan penggunaan biaya yang dialokasikan untuk pendidikan sehingga memiliki cara-cara pemecahan agar pemborosan tidak terulang lagi.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah harus dapat mengawasi dengan baik penggunaan dana yang diberikan kepada sekolah/madrasah agar tepat dan sesuai dengan penggunaan yang semestinya. Selain itu pemerintah harus memperhatikan alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah/madrasah agar dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan berkualitas, agar pengelolaan dana pendidikan dapat terlaksana berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

3. Penelitian Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang berkaitan dan berkontribusi dalam proses pengelolaan pembiayaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Bandung: Imtima, 2009.
- Anwar, M. Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
- Astuti, Yulia. "Sistem Kepengawasan Pendidikan pada SMP Hasbunallah Binaan PT Adaro Pama Persada Nusantara Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan." Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013.
- Bogdan dan Biklen. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theories and Methods*. Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007.
- Bray, Mark. *Double-Shift Schooling: Design and Operation for Cost-Effectiveness*. Paris: UNESCO, 2008.
- Clark, David, *et al.* *Financing of Education in Indonesia*. Hong Kong: Asian Development Bank and Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong, 1998.
- Crampton, Faith E. "Spending on School Infrastructure: does Money Matter?" *Journal of Educational Administration* Vol.47 No.3. Milwaukee-Wisconsin: Emerald Group Publishing Limited, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Danumiharja, Mintarsih. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Uhamka Pers, 2004.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

161

Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag. *Peningkatan Manajemen melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kemendiknas-Kemenag, 2011.

Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2013.

Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

———. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Gray, Clive, *et al.* *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Hanafi, Mamduh M. *Manajemen*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.

Harsono. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Suryajaya Press, 2007.

Hartani. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Hidayat, Ary dan Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Educa, 2010.

Jahari, Jaja dan Amirulloh Syarbini. *Manajemen Madrasah; Teori, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- . *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Tabalong,” dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014*. Tabalong: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, 2009.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. “Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong.”
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. “Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong.”
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rayburn, Letricia Gayle. *Cost Accounting: Using a Cost Management Approach*, terj Sugyanto. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Reality Team. *Advanced Dictionary: English-Indonesian, Indonesian-English*. Surabaya: Reality Publisher, 2007
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945.”

- Republik Indonesia. "Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional."
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan."
- Rivai, Veitzhal dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rohiat. *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik, Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhardan, Dadang, Riduwan, dan Enas. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sukirman, Hartati *et al.*, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sulistyorini. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Indeks, 2010.

- Supartini, Ni Luh Kadek. "Analisis Satuan Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011." Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2012.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Thomas, J Alan. *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration*. New York, London, Sydney, Toronto: John Wley and Sons Inc, 1971.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Penyusun. *Analisis Biaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Wirawan. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- World Bank. *Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2013.
- Z, Eddy Khairani. "Strategi Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan di MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau Kabupaten Tapin." Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.